

LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2017

BALAPATIJA
SURAKARTA

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
SURAKARTA, 2018**



PRAKATA

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, hidayah dan kekuatan Nya sehingga penulisan Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Makro Ekonomi Kota Surakarta dapat terselesaikan. Laporan ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada pihak pemberi tugas dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta.

Tim kajian mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Laporan ini merupakan kerjasama yang baik antara Bidang Ekonomi Bappeda Kota Surakarta dibantu oleh tim konsultan dan pemangku kepentingan di Kota Surakarta. Laporan ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik diharapkan untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang.

Semoga kajian dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di Kota Surakarta.

Surakarta, 2018

Tim Kajian

DAFTAR ISI

		Halaman
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Manfaat	2
	1.4. Sasaran	3
	1.5. Ruang Lingkup Kegiatan	3
	1.6. Sistematika Laporan	3
BAB II	GAMBARAN UMUM WILAYAH	5
	2.1. Aspek Geografis	5
	2.1.1. Kondisi Geografis Daerah	5
	1. Luas Wilayah dan Kondisi Topografis	5
	2. Wilayah Administratif	6
	2.2. Aspek Demografis	7
	2.2.1. Jumlah Penduduk	7
	2.2.2. Ketenagakerjaan	9
	2.2.3. Pendidikan	10
	2.3. Aspek Ekonomi	12
	2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi	12
	2.3.2. Struktur Ekonomi Daerah	13
	2.3.3. Pendapatan Perkapita	15
	2.4. Keuangan Daerah	16
BAB III	KONSEP DAN METODOLOGI	19
	3.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	19
	3.1.1. <i>Location Quotient</i> (LQ)	21
	3.1.2. <i>Shift Share</i> (SS)	23
	3.2. Demografi dan Ketenagakerjaan	25
	3.3. Indeks Pembangunan Manusia	26
	3.4. Keuangan Daerah	27
	3.4.1. Analisis Pendapatan Daerah	27
	1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan	28
	2. Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah	28
	3. Rasio Keuangan	29
	a. Rasio Kemandirian Daerah	29

	b. Rasio Ketergantungan Daerah	29
	c. Derajat Desentralisasi	30
	d. Rasio Efektivitas PAD	30
	3.4.2. Analisis Belanja	31
	1. Analisis Varians Belanja	31
	2. Analisis Pertumbuhan Belanja	31
	3. Analisis Keserasian Belanja	32
	a. Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja	32
	b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja	33
	c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja	33
	3.5. Kemiskinan	33
	3.6. Ketimpangan Distribusi Pendapatan	34
	3.7. Sumber Data	35
BAB IV	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	36
	4.1. Kinerja PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	36
	4.1.1. Struktur PDRB	36
	4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	39
	4.1.3. Kinerja Sektor Ekonomi	42
	4.1.3.1. Location Quotient (LQ)	42
	4.1.3.2. Shift-Share	44
	4.1.3.3. Elastisitas dan Korelasi	48
	4.1.3.4. Inflasi	50
	4.2. Ketenagakerjaan	53
	4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	57
	4.4. Kinerja Keuangan Daerah	62
	4.4.1. Pendapatan Daerah	62
	4.4.2. Belanja Daerah	65
	4.4.3. Rasio Keuangan Daerah	66
	4.5. Kemiskinan dan Ketimpangan	68
	4.6. Proyeksi Makroekonomi	72
	4.6.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)	73
	4.6.2. Proyeksi Indeks Gini	74
	4.6.3. Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	74
	4.6.4. Proyeksi Tingkat Kemiskinan (%)	75
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	76
	5.1. Kesimpulan	76
	5.2. Rekomendasi Kebijakan	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Luas Penggunaan Lahan Per Kecamatan Di Kota Surakarta Tahun 2016 (Ha)	6
Tabel 2.2.	Jumlah Kelurahan, RT, RW, dan Kepala Keluarga Di Kota Surakarta Tahun 2017	7
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kecamatan	8
Tabel 2.4.	Distribusi Kelompok Umur dan Rasio jenis Kelamin.....	9
Tabel 2.5.	Angkatan Kerja Kota Surakarta 2017	10
Tabel 2.6.	Sebaran Jumlah Sekolah dan Murid 2017	11
Tabel 2.7.	Indikator Rasio Pendidikan	11
Tabel 2.8.	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Di Kota Surakarta Tahun 2010-2016 (%).....	13
Tabel 2.9.	Struktur Kota Surakarta Tahun 2010-2016	14
Tabel 2.10.	Komponen Pendapatan Daerah 2015-2017	16
Tabel 2.11.	Komponen Belanja Daerah 2015-2017	17
Tabel 3.1.	Nilai maksimum dan Minimum Komponen IPM Metode Baru	27
Tabel 4.1.	Proporsi PDRB Kota Surakarta 2010-2016 Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%).....	37
Tabel 4.2.	Proporsi PDRB Kota Surakarta 2010-2016 Berdasarkan Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010	39
Tabel 4.3.	Peringkat 10 Besar Rata-rata Pertumbuhan per tahun Sektor/Subsektor 2010-2016	40
Tabel 4.4.	Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Sektor Ekonomi 2011-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010 ...	41
Tabel 4.5.	Nilai LQ Statis dan LQ Dinamis 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010	44
Tabel 4.6.	Shift-Share Klasik 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010	46
Tabel 4.7.	Shift-Share Dinamis 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010	47
Tabel 4.8.	Elastisitas dan Korelasi Komponen PDRB 2010-2016	50
Tabel 4.9.	Perkembangan Inflasi Kota Surakarta Menurut Kelompok Barang, 2012-2016	51
Tabel 4.10.	Perbandingan Laju Inflasi 2008-2016	52
Tabel 4.11.	Angkatan Kerja Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tertinggi tahun 2017	54

Tabel 4.12.	Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta, 2017	54
Tabel 4.13.	Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha, 2017	55
Tabel 4.14.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Tahun 2017	56
Tabel 4.15.	Perbandingan Angka Harapan Hidup 2010-2016	58
Tabel 4.16.	Perbandingan Harapan Lama Sekolah 2010-2016	59
Tabel 4.17.	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah 2010-2016	60
Tabel 4.18.	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Riil Antar Daerah, 2010-2016	61
Tabel 4.19.	Perbandingan IPM 2010-2016	62
Tabel 4.20.	Struktur dan Pertumbuhan Pendapatan 2015-2017	64
Tabel 4.21.	Struktur dan pertumbuhan Belanja Daerah 2015-2017	65
Tabel 4.22.	Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Semester I Tahun 2017	67
Tabel 4.23.	Peringkat Rasio Keuangan Kota Surakarta Tahun 2016	68
Tabel 4.24.	Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2017 ...	69
Tabel 4.25.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan 2010-2017	70
Tabel 4.26.	Perbandingan Indeks Gini 2010-2017	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Surakarta 2010-2016	15
Gambar 4.1. Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Barang, 2012-2016	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian daerah mengalami tuntutan perkembangan dan dinamika ekonomi yang terus berubah dengan sangat cepat. Potensi ekonomi yang ada menjadi tantangan untuk dapat dikelola dengan baik di tengah turbulensi perubahan yang semakin cepat. Kelemahan dan potensi kerawanan ekonomi selayaknya juga mendapat prioritas penanganan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait guna menghasilkan solusi penyelesaian yang kongkret dan cepat.

Dalam rangka identifikasi potensi ekonomi dan potensi kerawanan ekonomi diperlukan kajian yang menyeluruh dan komprehensif menyangkut segala aspek yang terkait, termasuk didalamnya terkait masalah demografi dan ketenagakerjaan, spasial ekonomi, keuangan daerah, bisnis, dan lingkungan yang kesemuanya saling terkait dalam konteks Ekonomi Makro sebuah daerah.

Kajian Evaluasi Kinerja Perekonomian Surakarta dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengetahui apakah program pembangunan yang dijalankan sudah sesuai dengan perencanaan. Evaluasi ini juga berupaya untuk mencari solusi terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta.

1.2. Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud dan tujuan Evaluasi Kinerja Perekonomian Surakarta ini adalah memberikan gambaran perekonomian makro meliputi kaitan dengan capaian-capaian pembangunan daerah khususnya terhadap variabel-variabel makro. Variabel tersebut antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, demografi, ketenagakerjaan, serta keuangan daerah di Kota Surakarta. Secara khusus tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan dengan indikator ekonomi makro melalui pendekatan produksi dan pengeluaran di Kota Surakarta.
- b. Mengevaluasi kinerja perekonomian Kota Surakarta, evaluasi meliputi indikator pertumbuhan ekonomi dan indikator pembangunan ekonomi meliputi evaluasi terhadap indikator pembangunan manusia (IPM).
- c. Mengevaluasi kebijakan terkait dengan elastisitas pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi di Kota Surakarta.
- d. Mengevaluasi kemampuan keuangan daerah ke depan dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi di Kota Surakarta.

1.3. Manfaat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan analisis terkait faktor-faktor yang dominan mempengaruhi perkeonomian secara makro di Kota Surakarta. Dengan analisis yang komprehensif dan mendalam diharapkan dapat menjadi alat bantu bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan dan kebijakan ekonomi di dalam lingkungan pemerintah Kota Surakarta.

1.4. Sasaran

Sasaran dari kajian evaluasi kinerja perekonomian Kota Surakarta ini adalah menyangkut indikator-indikator ekonomi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Demografi dan Ketenagakerjaan
3. Indikator Indeks Pembangunan Manusia
4. Perkembangan Keuangan Daerah
5. Indikator lain yang relevan

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Kajian Ekonomi Makro ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto
2. Analisis Pertumbuhan ekonomi dengan demografi, ketenagakerjaan, dan kesenjangan ekonomi
3. Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
4. Analisis Kinerja Keuangan Daerah
5. Analisis komparatif antara Kota Surakarta dengan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Evaluasi Kinerja Perekonomian Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, proses dan penyusunan Kajian Evaluasi Kinerja Perekonomian Surakarta.

BAB II : Gambaran Umum Wilayah

Dalam bab ini akan diuraikan kondisi wilayah secara umum untuk memberikan gambaran tentang Pemerintah Kota Surakarta dan sekitarnya secara utuh.

BAB III : Konsep dan Metodologi

Dalam bab ini akan diuraikan tentang cara pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis ekonomi regional secara utuh mengenai kondisi geografi wilayah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto, analisis pertumbuhan ekonomi dengan demografi, ketenagakerjaan, dan kesenjangan ekonomi, analisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, dan Analisis Perkembangan Keuangan Daerah.

BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis dan pembahasan dalam penyusunan kajian regional Kota Surakarta.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kondisi umum daerah Kota Surakarta dijelaskan dalam berbagai aspek, seperti aspek geografis, aspek demografis, aspek ketenagakerjaan, dan aspek ekonomis Kota Surakarta.

2.1. Aspek Geografis

2.1.1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan “Kota Solo” adalah salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo. Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, Kota Surakarta berada pada $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Kota Surakarta terletak pada posisi 103 Km sebelah tenggara Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, dan berjarak 557 Km sebelah timur dari ibu kota Negara Indonesia. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Kota Semarang dan Kota Yogyakarta.

1. Luas Wilayah dan Kondisi Topografis

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai $44,04 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu : Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar

kliwon, Jebres dan Banjarsari. Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 65 persen, sedangkan proporsi penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi juga cukup besar yaitu berkisar antara 16,5 persen dari luas lahan yang ada.

Tabel 2.1.
Luas Penggunaan Lahan Per Kecamatan
Di Kota Surakarta Tahun 2017 (Ha)

Kecamatan	Perumahan/ Pemukiman	Jasa	Perusahaan	Industri	Tanah Kosong	Tegalan
Laweyan	568,18	102,75	67,90	39,40	2,92	0,00
Serengan	230,62	19,45	33,23	6,14	2,13	0,00
Pasar Kliwon	310,51	49,82	36,48	7,17	9,66	0,00
Jebres	728,37	153,79	45,38	27,59	43,89	56,15
Banjarsari	1047,41	65,52	63,58	17,81	49,66	40,43
Jumlah 2017	2885,09	391,33	246,57	98,11	108,26	96,58
2016	2882,14	391,33	246,57	98,11	108,82	98,45
2015	2878,34	390,53	246,15	98,11	109,67	102,04
2014	2876,38	387,28	245,69	97,95	109,67	108,10
2013	2874,93	385,17	245,69	97,95	112,99	109,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2017

Lanjutan Tabel 2.1

Kecamatan	Sawah	Kuburan	Lap. OR	Taman Kota	Lain-lain	Total
Laweyan	20,59	6,08	12,03	0,25	43,76	863,86
Serengan	0,00	1,38	2,06	0,00	24,39	319,40
Pasar Kliwon	0,00	1,54	8,17	0,00	58,17	481,52
Jebres	17,10	31,05	9,03	8,34	137,49	1258,18
Banjarsari	57,05	28,78	28,76	3,52	78,58	1481,10
Jumlah 2017	94,74	68,83	60,05	12,11	342,39	4404,06
2016	95,39	68,83	60,05	12,11	342,26	4404,06
2015	95,97	68,83	60,05	12,11	342,26	4404,06
2014	95,97	68,83	60,05	12,08	342,06	4404,06
2013	96,96	68,83	60,05	12,08	340,13	4404,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2017

2. Wilayah Administratif

Wilayah Kota Surakarta terbagi dalam 5 Kecamatan terdiri dari 54 Kelurahan. Pembagian wilayah berdasarkan rukun warga tercatat

sebanyak 604 RW dan rukun tetangga sebanyak 2.714 RT. Dengan jumlah KK sebesar 169.772 KK, maka rata-rata jumlah KK setiap RT berkisar sebesar 63 KK setiap RT.

Tabel 2.2.
Jumlah Kelurahan, RT, RW, dan Kepala Keluarga
Di Kota Surakarta Tahun 2017

No.	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW	KK
1	Laweyan	11	457	105	32.233
2	Serengan	7	312	72	17.787
3	Pasar Kliwon	10	422	100	27.230
4	Jebres	11	646	151	46.396
5	Banjarsari	15	877	176	56.381
	JUMLAH	54	2.714	604	180.027

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2017
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017

2.2. Aspek Demografis

2.2.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dispendukcapil Kota Surakarta, pada Tahun 2017 jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 562.801 jiwa. Perbandingan antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan relatif hampir seimbang, yaitu laki-laki sebanyak 276.981 dan perempuan 285.820. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah sebesar 96,91; yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 97 penduduk laki-laki. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Banjarsari sebanyak 178.974 atau 31,80 persen dan kedua adalah Kecamatan Jebres yang mencapai 144.241 jiwa atau 25,63 persen. Kecamatan Serengan memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 53.996 atau hanya 9,59 persen.

Meski Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk terbanyak, namun karena memiliki area paling luas, kepadatan penduduk tertinggi bukanlah Kecamatan Banjarsari melainkan Kecamatan Pasar Kliwon.

Tingkat kepadatan penduduk menggambarkan perbandingan jumlah penduduk dengan total luas wilayah. Kecamatan Banjarsari memiliki tingkat kepadatan sebesar 12.084 per km² sementara Pasar Kliwon memiliki tingkat kepadatan 17.578 per km². Secara keseluruhan tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2017 mencapai 12.779 per km².

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kecamatan

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	Orang	%		
1	33.72.01	LAWEYAN	100.861	17,92%	8,64	11.673,73
2	33.72.02	SERENGAN	53.996	9,59%	3,19	16.926,65
3	33.72.03	PASAR KLIWON	84.729	15,05%	4,82	17.578,63
4	33.72.04	JEBRES	144.241	25,63%	12,58	11.465,90
5	33.72.05	BANJARSARI	178.974	31,80%	14,81	12.084,67
Jumlah			562.801	100,00%	44,04	12.779,31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2017

Dari aspek kelompok umur, penduduk dengan usia terbanyak adalah kelompok umur 35-39 tahun yang mencapai 47.526 orang atau 8,44 persen. Meski ini merupakan kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak, namun sebenarnya dibandingkan dengan kelompok umur yang lain tidak memiliki selisih jumlah yang signifikan, terutama hingga kelompok umur usia 55-59 tahun. Rasio jenis kelamin usia 0 hingga 34 tahun memiliki nilai di atas 100 (lebih banyak laki-laki dibanding perempuan), dan usia 35 tahun ke atas memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100.

Tabel 2.4.
Distribusi Kelompok Umur dan Rasio jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	0-4	19.706	18.965	38.671	103,91
2	5-9	23.162	22.212	45.374	104,28
3	10-14	23.297	22.202	45.499	104,93
4	15-19	22.216	21.772	43.988	102,04
5	20-24	20.963	20.557	41.520	101,97
6	25-29	19.788	19.689	39.477	100,50
7	30-34	21.475	21.311	42.786	100,77
8	35-39	23.662	23.864	47.526	99,15
9	40-44	20.877	21.241	42.118	98,29
10	45-49	19.547	20.792	40.339	94,01
11	50-54	17.477	19.655	37.132	88,92
12	55-59	15.196	17.039	32.235	89,18
13	60-64	12.063	13.212	25.275	91,30
14	65-69	7.819	8.819	16.638	88,66
15	70-74	4.067	5.608	9.675	72,52
16	>=75	5.666	8.882	14.548	63,79
Jumlah		276.981	285.820	562.801	96,91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, 2017

2.2.2. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja Kota Surakarta pada tahun 2017 mencapai 410.000 orang terdiri dari 197.088 laki-laki dan 213.685 perempuan. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan dan bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka.

Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja Kota Surakarta sebesar 271.527 orang. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2017 mencapai 66,10 persen. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, angkatan kerja laki-laki berjumlah 147.504 dan perempuan sebanyak 124.023.

Jumlah pengangguran di Kota Surakarta per Agustus 2017 mencapai 12.133 terdiri dari 6.553 laki-laki dan 5.580 perempuan. Dengan demikian

tingkat pengangguran di Kota Surakarta mencapai 4,47 persen. Tingkat pengangguran ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,57 persen.

Tabel 2.5.
Angkatan Kerja Kota Surakarta 2017

Kegiatan	Jenis Kelamin (Orang)		Total
	Laki laki	Perempuan	
ANGKATAN KERJA	147.504	124.023	271.527
Bekerja	140.951	118.443	259.394
Pengangguran	6.553	5.580	12.133
BUKAN ANKATAN KERJA	49.584	89.662	139.246
Sekolah	24.899	25.440	50.339
Mengurus Rumah Tangga	10.999	56.581	67.580
Lainnya	13.686	7.641	21.327
PENDUDUK USIA KERJA	197.088	213.685	410.773

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

2.2.3. Pendidikan

Pada tahun 2017/2018 total jumlah sekolah di Kota Surakarta mencapai 434 sekolah dan lebih dari 50% berjenjang sekolah dasar sederajat, yaitu 261. Sebagian besar SD berlokasi di Kecamatan Banjarsari, yaitu 83 SD dari 261 sekolah, sementara yang terkecil di Kecamatan Serengan dengan jumlah SD sebanyak 26 sekolah. Pola ini relatif sama untuk jenjang SMP sederajat, SMA sederajat, maupun SMK. Demikian pula dengan jumlah murid, dari total jumlah murid 133.477 sebagian besar murid berada di Kecamatan Banjarsari dan Laweyan. Meski untuk jenjang SD jumlah sekolah di Kecamatan Jebres dan Laweyan sama, namun jumlah murid di Laweyan sekitar 50% lebih banyak dibandingkan di Jebres. Hal yang sama juga terjadi untuk jenjang SMP dan SMA. Dengan demikian, minat peserta didik untuk melanjutkan sekolah di Laweyan lebih besar dibandingkan dengan Jebres, meski di Jebres sendiri jumlah sekolah sudah memadai.

Tabel 2.6.
Sebaran Jumlah Sekolah dan Murid 2017

Kecamatan	Jumlah Sekolah					Jumlah Murid				
	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
Laweyan	54	18	9	14	95	14.784	8.037	4.967	9.797	37.585
Serengan	26	10	3	4	43	5.581	3.107	1.212	2.392	12.292
Pasar Kliwon	44	11	4	3	62	10.484	3.574	1.425	1.320	16.803
Jebres	54	19	9	7	89	10.542	5.944	2.821	2.434	21.741
Banjarsari	83	25	16	21	145	20.198	10.840	6.554	7.464	45.056
Jumlah	261	83	41	49	434	61.589	31.502	16.979	23.407	133.477

Sumber: Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lanjutan Tabel 2.6.

Kecamatan	Jumlah Guru				
	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
Laweyan	954	497	333	795	2.579
Serengan	355	254	61	214	884
Pasar Kliwon	625	307	149	103	1.184
Jebres	718	477	282	287	1.764
Banjarsari	1.313	750	551	786	3.400
Jumlah	3.965	2.285	1.376	2.185	9.811

Bila dilihat rasionya, untuk jenjang SD rasio guru per sekolah adalah 15,19 yang berarti rata-rata jumlah guru untuk setiap SD adalah 15,19. Jumlah ini sudah memenuhi standar pendidikan nasional.

Tabel 2.7.
Indikator Rasio Pendidikan

Kecamatan	Guru per Sekolah					Murid per Guru				
	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
Laweyan	17,67	27,61	37,00	56,79	27,15	15,50	16,17	14,92	12,32	14,57
Serengan	13,65	25,40	20,33	53,50	20,56	15,72	12,23	19,87	11,18	13,90
Pasar Kliwon	14,20	27,91	37,25	34,33	19,10	16,77	11,64	9,56	12,82	14,19
Jebres	13,30	25,11	31,33	41,00	19,82	14,68	12,46	10,00	8,48	12,32
Banjarsari	15,82	30,00	34,44	37,43	23,45	15,38	14,45	11,89	9,50	13,25
Jumlah	15,19	27,53	33,56	44,59	22,61	15,53	13,79	12,34	10,71	13,60

Sumber: Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lanjutan Tabel 2.7.

Kecamatan	Murid per Sekolah				
	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
Laweyan	273,78	446,50	551,89	699,79	395,63
Serengan	214,65	310,70	404,00	598,00	285,86
Pasar Kliwon	238,27	324,91	356,25	440,00	271,02
Jebres	195,22	312,84	313,44	347,71	244,28
Banjarsari	243,35	433,60	409,63	355,43	310,73
Jumlah	235,97	379,54	414,12	477,69	307,55

2.3. Aspek Ekonomi

2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Bila dilihat pertumbuhan dari tahun ke tahun, terdapat kedenderungan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mencapai 6,42 persen dan pada tahun 2012 turun menjadi 5,58 persen meski pada tahun 2013 naik kembali menjadi 6,35 persen. Namun setelah tahun 2013, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun selama 2010-2017 menunjukkan angka 5,66 persen. Angka pertumbuhan ini cukup besar bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari aspek rata-rata pertumbuhan sektoral per tahun selama 2010-2017, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu 8,90 persen dan disusul kemudian oleh sektor Jasa Perusahaan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 8,62 persen. Sementara itu sektor pertambangan dan penggalan menunjukkan tren pertumbuhan yang negatif sepanjang 2010-2017 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun -1,70 persen. Hal ini sangat wajar mengingat kondisi geografis Kota Surakarta yang menyebabkan sulitnya sektor ini berkembang.

Tabel 2.8.
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Di Kota Surakarta Tahun 2010-2017 (%)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,24	2,40	5,03	1,87	1,80	1,17	3,84	3,48
Pertambangan dan Penggalian	-5,32	-0,42	-0,41	-2,30	-2,62	-0,44	-0,39	-1,70
Industri Pengolahan	6,76	7,35	9,02	6,85	3,66	3,71	4,20	5,94
Pengadaan Listrik dan Gas	8,17	12,55	7,90	2,71	2,51	6,24	4,27	6,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,36	-2,54	-1,67	2,55	1,77	2,40	5,68	1,51
Konstruksi	1,91	5,45	3,92	3,65	5,36	6,43	4,96	4,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,45	2,06	7,44	4,27	4,11	4,55	5,49	5,48
Transportasi dan Pergudangan	4,54	6,44	10,32	8,38	8,38	5,31	5,70	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	7,82	5,73	6,95	6,18	5,09	4,41	6,33
Informasi dan Komunikasi	8,50	11,81	8,27	8,94	6,67	6,08	8,95	8,46
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,50	2,98	3,49	4,08	6,41	8,34	4,26	4,87
Real Estate	7,09	7,07	5,20	6,41	7,22	6,40	5,16	6,36
Jasa Perusahaan	11,19	7,18	9,36	6,86	9,28	8,34	3,97	8,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,81	1,66	3,88	1,23	6,46	2,34	1,24	2,80
Jasa Pendidikan	13,06	10,56	7,95	7,98	6,85	3,76	4,52	7,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,05	7,49	8,16	12,59	6,26	7,02	6,77	8,62
Jasa lainnya	3,27	4,35	6,03	4,25	3,09	5,63	6,86	4,78
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010	6,42	5,58	6,25	5,28	5,44	5,32	5,33	5,66

Sumber: PDRB Kota Surakarta 2010-2017, diolah.

2.3.2. Struktur Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi daerah menggambarkan kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB. Dengan mengamati struktur ekonomi dari tahun ke tahun akan terlihat pola dan perkembangan kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara umum maupun secara lintas sektoral. Selama kurun waktu 2010-2016, sektor konstruksi merupakan sektor yang menjadi andalan yang terbesar di Kota Surakarta dengan rata-rata kontribusi

terhadap PDRB sebesar 26,69 persen. Sektor kedua dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata kontribusi selama 2010-2016 sebesar 23,94 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terkecil sepanjang 2010-2016 yaitu rata-rata sebesar 0,0022 persen.

Tabel 2.9.
Struktur Kota Surakarta Tahun 2010-2016

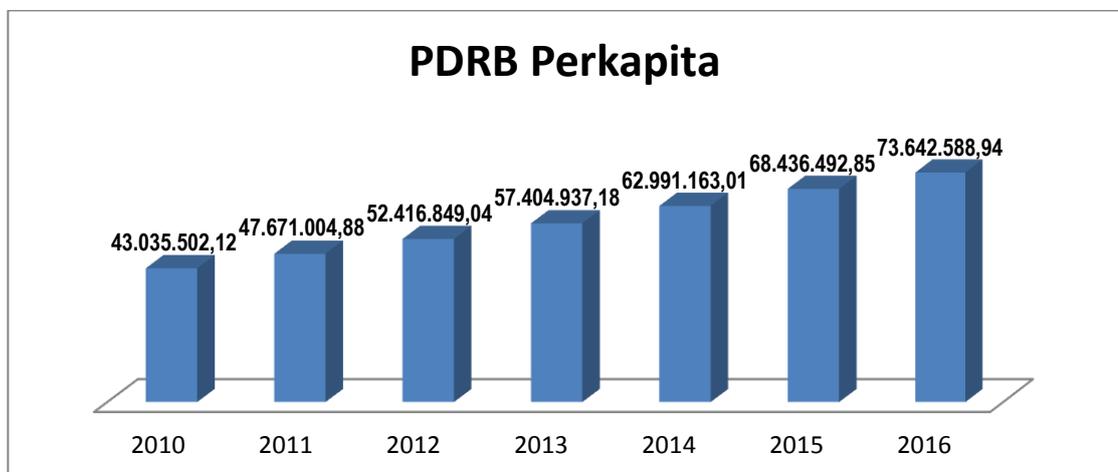
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Proporsi 2010-2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,51	0,50	0,49	0,47	0,46	0,44	0,48
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	7,62	7,64	7,77	7,98	8,09	7,96	7,84	7,84
Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,22	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,22	0,22	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17	0,19
Konstruksi	28,23	27,03	27,00	26,40	25,99	25,97	26,25	26,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,81	24,72	23,90	24,16	23,93	23,63	23,46	23,94
Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,59	2,61	2,71	2,79	2,87	2,87	2,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	4,95	5,05	5,03	5,11	5,14	5,13	5,04
Informasi dan Komunikasi	11,36	11,58	12,27	12,5	12,94	13,09	13,18	12,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,65	3,58	3,49	3,40	3,36	3,39	3,49	3,48
Real Estate	4,23	4,25	4,31	4,27	4,32	4,39	4,43	4,32
Jasa Perusahaan	0,64	0,67	0,67	0,69	0,70	0,73	0,75	0,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,46	6,24	6,01	5,88	5,65	5,71	5,54	5,93
Jasa Pendidikan	3,66	3,89	4,07	4,14	4,24	4,30	4,24	4,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,90	0,92	0,93	1,00	1,00	1,02	0,94
Jasa lainnya	1,04	1,01	0,99	0,99	1,00	0,96	0,96	0,99
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,000

Sumber: PDRB Kota Surakarta 2010-2016, diolah.

2.3.3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan setiap penduduk yang dihitung dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk (pertengahan tahun). Terdapat dua pendekatan perkapita yaitu pendapatan perkapita riil dan pendapatan perkapita nominal. Pendapatan perkapita riil merupakan pendapatan perkapita yang dihitung dengan menggunakan pendekatan harga konstan, sehingga hanya mendasarkan pada output perekonomian dan menghilangkan faktor inflasi atau kenaikan harga barang. Pendapatan perkapita nominal dihitung dengan menggunakan pendekatan harga berlaku.

Perkembangan pendapatan perkapita di Kota Surakarta atas dasar harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pendapatan perkapita mencapai 43 juta rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 73,6 juta rupiah. Hal ini berarti rata-rata pertumbuhan pendapatan perkapita tiap tahun mencapai 9,37 persen. Nilai pendapatan perkapita dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.



Sumber: PDRB Kota Surakarta 2010-2016, diolah.

Gambar 2.1.
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Surakarta 2010-2016

2.4. Keuangan Daerah

Keuangan daerah secara makro dapat dilihat kondisi APBD Kota Surakarta yang terdiri dari komponen pendapatan dan belanja daerah. Pada tahun 2015 pendapatan Kota Surakarta mencapai 1,568 trilyun rupiah dan tahun 2016 naik menjadi 1,703 trilyun rupiah atau naik sebesar 8,58 persen. Tahun 2017 kembali naik menjadi 1,803 trilyun rupiah atau naik sebesar 5,93 persen dibandingkan tahun 2016. Pendapatan tahun 2017 tersebut berasal dari PAD 527 milyar rupiah, dana perimbangan 1.048 milyar rupiah, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar 228 milyar rupiah. Untuk komponen PAD, sebagian besar bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar 288 milyar rupiah, sedangkan komponen dana perimbangan sebagian besar bersumber dari dana alokasi umum yaitu sebesar 826 milyar rupiah. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagian besar bersumber dari bagi hasil pajak yaitu sebesar 153 milyar rupiah.

Tabel 2.10.
Komponen Pendapatan Daerah 2015-2017

KETERANGAN	2015	2016	2017
PENDAPATAN	1.568.482.686.616	1.703.003.847.995	1.803.915.423.159
Pendapatan Asli Daerah	372.798.426.790	425.502.779.064	527.538.846.222
Pajak Daerah	233.085.404.386	252.052.998.369	288.417.472.037
Retribusi Daerah	51.234.923.568	59.650.828.203	61.536.951.057
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.584.189.359	7.290.937.952	20.058.584.208
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	80.893.909.477	106.508.014.539	157.525.838.920
Dana Perimbangan	755.728.419.465	1.103.859.741.264	1.048.161.106.387
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	38.677.463.465	65.599.599.264	50.601.936.437
Dana Alokasi Umum	713.300.856.000	841.536.122.000	826.753.038.000
Dana Alokasi Khusus	3.750.100.000	196.724.020.000	170.806.131.950
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	439.955.840.361	173.641.327.667	228.215.470.550
Pendapatan Hibah	-	1.443.754.749	2.709.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	129.786.943.361	148.855.647.918	153.771.939.550
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	275.572.129.000	5.002.425.000	51.871.631.000
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	34.596.768.000	18.339.500.000	19.862.900.000

Sumber: Pemerintah Kota Surakarta, 2018.

Untuk aspek belanja daerah, pada tahun 2015 total belanja daerah adalah 1,532 trilyun rupiah dan tahun 2016 naik menjadi 1,680 trilyun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 9,65 persen. Tahun 2017, total belanja naik menjadi 1,768 trilyun rupiah atau naik sebesar 5,23 persen dibandingkan tahun 2016. Dengan demikian, persentase kenaikan total belanja ini lebih kecil dibandingkan dengan persentase kenaikan pendapatan. Komponen belanja terbagi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sementara itu belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.11.
Komponen Belanja Daerah 2015-2017

KETERANGAN	2015	2016	2017
BELANJA	1.532.527.097.064	1.680.456.921.161	1.768.346.964.316
Belanja Tidak Langsung	902.326.378.106	922.713.441.467	737.482.501.879
Belanja Pegawai	839.220.621.613	870.396.541.669	660.749.236.080
Belanja Bunga	543.941.049	441.570.521	336.644.278
Belanja Hibah	57.298.323.252	47.969.414.000	55.468.336.550
Belanja Bantuan Sosial	4.310.500.000	3.153.707.303	19.934.438.387
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	677.113.524	731.712.896	859.901.120
Belanja Tidak Terduga	275.878.668	20.495.078	133.945.464
Belanja Langsung	630.200.718.958	757.743.479.694	1.030.864.462.437
Belanja Pegawai	34.057.188.790	27.733.214.456	43.998.644.864
Belanja Barang dan Jasa	360.313.939.466	422.475.910.668	517.280.076.934
Belanja Modal	235.829.590.702	307.534.354.570	469.585.740.639
SURPLUS/DEFISIT	35.955.589.552	22.546.926.834	35.568.458.843

Sumber: Pemerintah Kota Surakarta, 2018

Pada tahun 2017 komponen belanja tidak langsung sebagian besar untuk belanja pegawai, yaitu 660 milyar rupiah sementara untuk belanja langsung sebagian besar berasal dari komponen belanja barang dan jasa yaitu 517 milyar rupiah. Dengan membandingkan pendapatan dan belanja, maka pada tahun

2015 APBD Kota Surakarta mengalamik surplus sebesar 35 milyar rupiah dan tahun 2016 surplus turun menjadi 22 milyar rupiah, dan pada tahun 2017 surplus kembali naik menjadi 35 milyar rupiah.

BAB III

KONSEP DAN METODOLOGI

3.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB diartikan sebagai nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian daerah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB dihitung dengan pendekatan pendapatan, pendekatan hasil produksi, serta pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan yang menghitung PDRB dari empat komponen pendapatan (upah/gaji, bunga, sewa, dan laba) belum dipergunakan di Indonesia, sehingga pendapatan nasional maupun PDRB menggunakan pendekatan hasil produksi dari sektor ekonomi atau lapangan usaha, serta pendekatan pengeluaran dari empat sektor (rumah tangga, swasta, pemerintah, dan luar negeri).

PDRB dihitung menggunakan dasar harga berlaku (*current price*) dan harga konstan (*constant price*). PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku disebut juga dengan PDRB nominal, sehingga nilai output dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat itu. Sebaliknya, PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga konstan disebut juga dengan PDRB riil karena nilai output dihitung berdasarkan patokan harga pada tahun tertentu (tahun dasar). PDRB ini disebut dengan PDRB riil karena secara riil mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan output dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi). PDRB atas dasar harga konstan ini dijadikan dasar dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan nilai output dari satu periode ke periode berikutnya.

PDRB dengan menggunakan hasil produksi merupakan PDRB yang dihitung berdasarkan nilai output dari 17 sektor ekonomi. Secara matematis, PDRB ini dihitung dengan cara:

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Dimana:

$$Y = \text{PDRB}$$

P_i = Harga produk untuk produk ke $i=1\dots n$

Q_i = kuantitas produk untuk produk ke $i=1\dots n$

Sementara itu untuk PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran dihitung dari penjumlahan:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

$$Y = \text{PDRB}$$

C = konsumsi (pengeluaran) rumah tangga

I = konsumsi (pengeluaran) swasta

G = konsumsi (pengeluaran) pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, dipergunakan formula:

$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$

PDRB_t = Nilai PDRB harga konstan pada tahun tertentu

PDRB_{t-1} = Nilai PDRB harga konstan pada satu tahun sebelumnya.

Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata pertumbuhan PDRB dalam kurun waktu tertentu, dipergunakan formula:

$$\text{Rata-rata pertumbuhan PDRB} = \left(\frac{Y_t}{Y_0} \right)^{1/n} - 1$$

Dimana:

Y_t = Nilai PDRB tahun terakhir

Y_0 = Nilai PDRB tahun paling awal

N = jumlah periode waktu

Apabila nilai PDRB diganti dengan nilai komponen sektor ekonomi, maka akan diperoleh informasi pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan sektor ekonomi tertentu dari 17 sektor.

3.1.1. *Location Quotient (LQ)*

Metode *location quotient* (LQ) Kadariah (1985) dalam Cahyadin (2010) menjelaskan dasar pemikiran penggunaan metode *location quotient* (LQ) yang dilandasi dengan teori ekonomi dimaksudkan bahwa industri basis yang menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah ataupun untuk pasar di luar daerah, sehingga penjualan hasil ke luar daerah akan mendatangkan pendapatan ke dalam daerah itu. Arus pendapatan tersebut akan menyebabkan kenaikan konsumsi maupun investasi yang pada akhirnya dapat menaikkan pendapatan daerah dan kesempatan kerja.

Metode *location quotient* (LQ) dibedakan menjadi dua, yaitu *static location quotient* (SLQ) dan *dynamic location quotient* (DLQ)

a. *Static Location Quotient* (SLQ)

SLQ dirumuskan sebagai berikut:

$$SLQ = \frac{q_i/q_r}{Q_i/Q_n}$$

Dimana:

SLQ_j = Koefisien *Static Location Quotient*

Q_i = Keluaran sektor i nasional

q_i = Keluaran sektor i regional

Q_n = Keluaran total nasional

q_r = Keluaran total regional

Rumus tersebut mengartikan bahwa jika koefisien LQ lebih besar dari 1 maka sektor tersebut cenderung akan mengekspor keluaran produksinya ke wilayah lain, atau mungkin ekspor ke luar negeri. Dan apabila nilai koefisien LQ lebih kecil dari 1 maka sektor tersebut cenderung mengimpor dari wilayah lain atau dari luar negeri.

b. *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Menurut Cahyadin (2010), *Dynamic Location Quotient* (DLQ) merupakan modifikasi dari *Static Location Quotient* (SLQ), dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu. DLQ dirumuskan sebagai berikut:

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{1 + g_{ij} / 1 + g_j}{1 + G_i / 1 + G} \right]^t = \frac{IPPS_{ij}}{IPPS_i}$$

Dimana:

DLQ_{ij} = Indeks potensi sektor i di regional

g_{ij} = Laju pertumbuhan sektor i di regional

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di regional

G_i = Laju pertumbuhan sektor i di nasional

G = Rata-rata laju pertumbuhan sektor di nasional

t = Selisih tahun akhir dan tahun awal

$IPPS_{ij}$ = Indeks Potensi Pengembangan sektor i di regional

$IPPS_i$ = Indeks Potensi Pengembangan sektor i di nasional

Nilai DLQ dapat diartikan sebagai berikut: apabila nilai DLQ lebih besar dari 1 maka potensi perkembangan sektor di tingkat regional lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat nasional. Dan apabila nilai DLQ lebih kecil dari 1 maka potensi perkembangan sektor di tingkat regional lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional secara keseluruhan.

3.1.2. Shift Share (SS)

Cahyadin (2010) analisis *shift share* bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Analisis ini digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor yang ada di daerah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional beserta sektor-sektornya, serta mencermati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan yang telah dilakukan. Apabila ditemukan penyimpangan positif, maka suatu sektor dalam daerah memiliki keunggulan kompetitif.

Analisis *shift share* terdapat data tentang kinerja perekonomian dalam tiga bidang yang saling berhubungan, yaitu membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel daerah, pendapatan atau *output* selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh: pertumbuhan nasional (N), bauran industri/*industry mix* (M) dan keunggulan kompetitif (C). Jadi, pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*share*), pengaruh bauran industri/*industry mix* disebut *proportional shift* dan pengaruh keunggulan kompetitif disebut *regional share* atau *differential shift*.

Cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menganalisis perubahan agregat sektor ekonomi kemudian dibuat perbandingan dengan sektor perekonomian yang sama sebagai acuan. *Proportional shift* digunakan untuk mengukur perubahan relatif,

pertumbuhan atau penurunan pada suatu daerah dengan perekonomian dengan skala yang lebih besar sebagai acuan. *Differential Shift* digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing ekonomi lokal terhadap perekonomian nasional sebagai acuan.

Berikut perhitungan untuk masing-masing pengaruh diatas adalah:

- *National shift* : $Y_{r,i,t} - n(Y_{n,t}/Y_{n,t-n}) - Y_{r,i,t-n}$
- *Proportional shift* : $Y_{n,i,\frac{t}{En},i,t-n} - (Y_{n,t}/Y_{n,t-n}) Y_{r,i,t-n}$
- *Differential shift* : $Y_{r,i,t} - Y_{n,i,\frac{t}{Yn},i,t-n} (Y_{r,i,t-n})$

Dimana:

Y : PDRB

N : nasional

r : regional/lokal

i : unit analisis sektor i

t : tahun sekarang

t-n: tahun awal

Kajian Soepono (1993) menjelaskan bentuk umum persamaan dari komponen-komponen Shift Share (untuk industri atau sektor i di wilayah j yaitu:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Apabila analisis ini diterapkan dengan menggunakan sektor ekonomi/lapangan usaha, maka:

$$D_{ij} = E_{ij}^* - E_{ij}$$

$$N_{ij} = E_{ij} * r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Dimana:

r_{ij} , r_{in} dan r_n mewakili laju pertumbuhan daerah dan laju pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = \frac{(E_{ij}^* - E_{ij})}{E_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(E_{in}^* - E_{in})}{E_{in}}$$

$$r_n = \frac{(E_n^* - E_n)}{E_n}$$

Dimana:

- E_{ij} = PDRB sektor i di wilayah j
- E_{in} = PDB sektor i di tingkat nasional
- E_n = PDB Nasional

Kesemuanya diukur menurut tahun dasar, sedangkan tanda *superscript* (*) menunjukkan keluaran produksi pada tahun akhir analisis.

3.2. Demografi dan Ketenagakerjaan

Penduduk terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengertian “bekerja” menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Menurut BPS, penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dengan cara:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan menggunakan metode baru BPS, IPM dihitung berdasarkan 4 ukuran yang meliputi: (1) angka harapan hidup, (2) harapan lama sekolah, (3) rata-rata lama sekolah, serta (4) pengeluaran perkapita. Angka melek huruf dalam metode baru IPM dihilangkan karena dianggap sudah kurang relevan lagi saat ini.

Nilai maksimum dan minimum komponen IPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.
Nilai maksimum dan Minimum Komponen IPM Metode Baru

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.4. Keuangan Daerah

3.4.1. Analisis Pendapatan Daerah

Dalam analisis ini akan dilakukan penghitungan berbagai rasio APBD yang mampu menggambarkan kinerja APBD dari berbagai sisi: seperti derajat kemandirian fiskal, efisiensi, efektivitas, aktivitas, dan sebagainya. Berdasarkan pengukuran rasio, akan diperoleh informasi kinerja APBD dari tahun ke tahun, termasuk kesesuaian dengan berbagai indikator

sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundangan. Analisis ini meliputi antara lain:

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

- a. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.
- b. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar.
- c. Menilai signifikansi selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan.
- d. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan

2. Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis proporsi dan pertumbuhan dimaksudkan untuk melihat perkembangan proporsi dari waktu ke waktu. Proporsi dalam hal ini adalah perbandingan antara komponen APBD terhadap total APBD (misal: nilai PAD terhadap Pendapatan Daerah), atau sub komponen APBD (misal: total nilai pajak terhadap PAD atau terhadap total pendapatan). Dengan melihat proporsi, dapat diungkapkan struktur APBD pada periode tertentu serta membandingkan nilai proporsi antar komponen APBD. Proporsi dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$\text{Proporsi Komponen APBD} = \frac{\text{Komponen APBD}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$

Analisis pertumbuhan dimaksudkan untuk melihat pertumbuhan komponen APBD maupun total APBD dari waktu ke waktu. Berdasarkan informasi ini, akan diketahui tren atau kecenderungan pertumbuhan setiap komponen APBD sehingga dapat terungkap informasi perbandingan pertumbuhan antar komponen APBD. Apabila pertumbuhannya negatif, maka keadaan itu menunjukkan bahwa telah

terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebabnya. Pendapatan pada formula berikut dapat digunakan untuk PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Transfer. Pertumbuhan Komponen dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Pertumbuhan Komponen APBD} = \frac{\text{Komponen APBD}_t - \text{Komponen APBD}_{t-1}}{\text{Komponen APBD}_{t-1}} \times 100\%$$

3. Rasio keuangan

a. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan terhadap dana dari pihak eksternal, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemandirian daerah dapat dikategorikan **tinggi** jika nilai rasio kemandiriannya diatas 75 persen; **sedang** jika nilai rasio kemandiriannya lebih dari 50 persen sampai dengan 75 persen; **rendah** jika nilai rasio lebih dari 25 persen sampai dengan 50 persen, dan **rendah** jika nilai rasio kurang dari 25 persen.

b. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

c. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi kontribusi PAD pada Total Pendapatan Daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

d. Rasio Efektivitas PAD

Analisis efektivitas adalah kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 kriteria nilai efektifitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika nilai rasionya di atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya lebih dari 90 persen sampai dengan 100 persen, cukup efektif jika nilai rasionya lebih dari 80 persen sampai dengan 90 persen, kurang efektif jika nilai rasionya lebih dari 60 persen sampai dengan 80 persen, dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang atau sama dengan 60 persen.

3.4.2. Analisis Belanja

Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Analisis belanja daerah pada umumnya meliputi:

1. Analisis Varians Belanja

Varians Belanja dihitung dengan menghitung selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Hal yang penting dalam analisis varians adalah:

- a. Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan?
- b. Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak?
- c. Berapa tingkat selisih (varians) yang bisaditoleransi?

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun. Pada umumnya perkembangan belanja cenderung untuk selalu meningkat. Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat

dipertanggungjawabkan atau tidak. Formula yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan adalah:

$$\text{Pertumbuhan Belanja th t} = \frac{\text{Realisasi Belanja th t} - \text{Realisasi Belanja th (t-1)}}{\text{Realisasi Belanja th (t-1)}} \times 100\%$$

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

a. Analisis Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja

Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Yang dimaksud fungsi di sini, dapat berupa:

- Pelayanan Umum Pemerintahan
- Ketertiban dan Keamanan
- Ekonomi
- Lingkungan Hidup
- Perumahan dan Fasilitas Umum
- Kesehatan
- Pariwisata dan Budaya
- Pendidikan
- Perlindungan Sosial

b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dan total belanja daerah dan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara Total Realisasi Belanja Modal dengan Total Belanja daerah dan dirumuskan seperti berikut ini:

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3.5. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

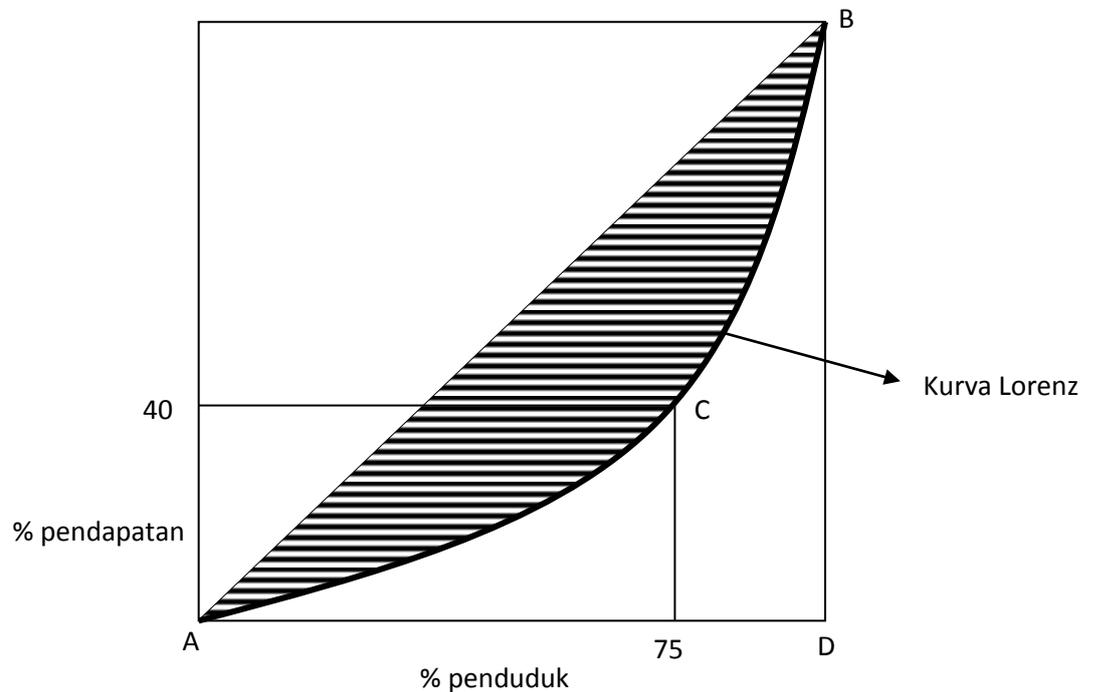
Kondisi kemiskinan menurut BPS dapat diukur dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

3.6. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pendapatan per kapita diukur dengan cara membagi PDB atau PNB dengan jumlah penduduk. PDB atau PNB yang dipergunakan bisa berupa PDB atau PNB riil (atas dasar harga konstan), bisa pula PDB atau PNB harga berlaku. Jumlah penduduk yang dipergunakan adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan per kapita dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara umum. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula kemakmuran penduduk wilayah tersebut. Pendapatan perkapita tidak memiliki hubungan dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, artinya Negara yang pendapatan perkapita nya tinggi, bisa saja ketimpangannya juga tinggi. Bila hal tersebut terjadi, berarti struktur ekonomi wilayah tersebut masih tergantung pada sekelompok masyarakat tertentu. Analisis ketimpangan diperlukan mengingat apakah hasil pembangunan daerah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan lebih adil. Bila indeks ini semakin baik maka tingkat kesejahteraan masyarakat baik antar individu dan wilayahnya akan semakin membaik pula.

Ketimpangan diukur dengan menggunakan Gini Ratio, yang diturunkan dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, berarti kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, dan distribusi pendapatan semakin semakin tidak merata (ketimpangan semakin tajam).



Contoh di atas: 75% penduduk menguasai 40% pendapatan (berarti 25% penduduk menguasai 60% pendapatan). Koefisien Gini= ABC/ABD

3.7. Sumber Data

Data dalam kajian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai pihak, seperti: (1) Badan Pusat Statistik, (2) Bappeda, (3) RPJMD Kota Surakarta, (4) LAKIP, (5) SKPD dan Kementerian terkait yang dipandang relevan dengan kajian. Data yang bersumber dari BPS berupa dokumen: (1) Daerah Dalam Angka beberapa tahun terbitan, (2) PDRB Kota Surakarta terbitan terakhir, dan (3) Statistik Daerah.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kinerja PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

4.1.1. Struktur PDRB

Perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh sektor konstruksi, sektor perdagangan, serta sektor informasi dan komunikasi. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor-sektor tersebut dalam PDRB. Pada tahun 2010 misalnya, kontribusi sektor konstruksi mencapai 28,23 persen, sektor perdagangan 23,82 persen, serta sektor informasi dan komunikasi mencapai 11,36 persen. Dengan demikian kontribusi ketiga sektor tersebut dalam PDRB tahun 2010 mencapai 63,41 persen. Bila ditambah dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang besarnya 4,87 persen maka kontribusinya menjadi 68,28 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Surakarta merupakan kota perdagangan dan jasa.

Sektor industri pengolahan yang pada tahun 2010 mencapai 7,62 persen tidak mendominasi struktur PDRB. Kontribusi sektor industri pengolahan dengan sektor konstruksi, sektor perdagangan, serta sektor informasi dan komunikasi terlihat cukup besar. Di Surakarta sektor industri pengolahan didominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman, subsektor industri tekstil dan pakaian jadi, serta subsektor pengolahan tembakau.

Pada tahun 2016 terjadi perubahan struktur ekonomi di berbagai sektor bila dibandingkan tahun 2010. Selama kurun waktu 6 tahun tersebut sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan rata-rata pertumbuhan proporsi yang negatif yaitu -2,20 persen. Hampir semua subsektor menunjukkan proporsi yang semakin kecil, terutama

subsektor tanaman pangan yang proporsinya rata-rata menunjukkan pertumbuhan -10,10 persen. Hanya subsektor jasa pertanian dan perburuan yang memiliki rata-rata pertumbuhan proporsi positif meski sangat kecil yaitu 0,41 persen. Rata-rata pertumbuhan subsektor yang negatif ini juga terjadi pada sektor-sektor ekonomi lainnya. Di sektor industri pengolahan, meski sangat kecil terjadi rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 0,46 persen. Subsektor yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan proporsi negatif terbesar adalah subsektor industri kertas dan barang dari kertas, percetakan yaitu -3,96 persen. Subsektor ini selama 2010-2015 menunjukkan tren negatif, namun dari 2015-2016 terjadi tren positif dalam hal proporsi terhadap PDRB.

Tabel 4.1.
Proporsi PDRB Kota Surakarta 2010-2016 Berdasarkan Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Proporsi 2010-2016	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi 2010-2016 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	0,51	0,49	0,49	0,47	0,46	0,44	0,48	-2,20
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,23
Industri Pengolahan	7,62	7,64	7,77	7,97	8,09	7,96	7,84	7,84	0,46
Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,22	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,23	0,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,23	0,22	0,20	0,18	0,18	0,17	0,17	0,19	-4,66
Konstruksi	28,23	27,03	27,00	26,40	25,99	25,97	26,25	26,70	-1,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,82	24,72	23,89	24,16	23,93	23,63	23,46	23,94	-0,25
Transportasi dan Pergudangan	2,64	2,59	2,61	2,71	2,79	2,87	2,87	2,73	1,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	4,95	5,05	5,03	5,11	5,14	5,13	5,04	0,88
Real Estate	4,23	4,25	4,31	4,27	4,32	4,39	4,45	4,32	0,80
Jasa Perusahaan	0,64	0,66	0,67	0,69	0,70	0,73	0,75	0,69	2,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6,46	6,24	6,01	5,88	5,65	5,71	5,54	5,93	-2,52
Jasa Pendidikan	3,66	3,89	4,07	4,14	4,24	4,30	4,24	4,08	2,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,90	0,92	0,93	1,00	1,00	1,02	0,95	3,02
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010	100,00								

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, data subsektor perhatikan Lampiran 1

Informasi proporsi menggambarkan tentang peran sektor atau subsektor dalam perekonomian Kota Surakarta. Semakin tinggi proporsinya, semakin besar pula peranan sektor atau subsektor tersebut sehingga guncangan internal atau eksternal yang berdampak pada sektor atau subsektor tersebut akan mempengaruhi perekonomian Kota Surakarta. Proporsi yang menurun tidak berkaitan secara langsung dengan pertumbuhan output, sehingga pertumbuhan proporsi yang negatif tidak berarti pertumbuhan outputnya juga negatif. Misalnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki proporsi semakin lama semakin kecil, namun rata-rata pertumbuhan outputnya selama 2010-2016 mencapai 3,39 persen. Dengan demikian peranan sektor ini semakin lama semakin kecil, meski outputnya menunjukkan peningkatan. Hanya subsektor tanaman pangan yang menunjukkan angka negatif baik dari sisi pertumbuhan proporsi maupun pertumbuhan output. Pembangunan infrastruktur, perumahan, fasilitas, serta industri akan menyebabkan lahan untuk tanaman pangan semakin sempit dan mengurangi kualitas air dan kesuburan tanah.

Kinerja perekonomian Kota Surakarta dapat dilihat dari sudut pandang pengeluaran yaitu pengeluaran rumah tangga, swasta, pemerintah, dan luar negeri. Konsumsi rumah tangga memiliki proporsi yang cukup tinggi dalam perekonomian Kota Surakarta, yaitu sekitar 50 persen, sedangkan pengeluaran untuk investasi sekitar 65 persen. Jumlah yang lebih dari 100 persen ini disebabkan karena ekspor neto yang negatif, sehingga posisi neraca perdagangan Kota Surakarta selalu defisit. Untuk pengeluaran konsumsi masyarakat, sebagian besar didominasi oleh pengeluaran makanan dan minuman sekitar 11-13 persen, serta pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, dan rekreasi sekitar 16 persen. Pengeluaran pemerintah sendiri tergolong kecil yaitu sekitar 10 persen. Hal ini merupakan indikasi bahwa peran masyarakat dalam

pembangunan Kota Surakarta cukup besar, beberapa kegiatan ekonomi masyarakat digerakkan oleh mereka sendiri sehingga peran pemerintah dalam perekonomian Kota Surakarta adalah sebagai penyeimbang atau pelengkap. Pemerintah berperan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui kebijakan, sehingga diharapkan pengeluaran pemerintah lebih fokus untuk sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pendukung.

Tabel 4.2.
Proporsi PDRB Kota Surakarta 2010-2016 Berdasarkan Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Proporsi 2010-2016	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi 2010-2016 (%)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,66	50,76	50,73	50,13	49,84	49,47	48,75	50,04	-0,64
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,56	0,55	0,55	0,56	0,57	0,53	0,53	0,55	-1,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,56	11,21	10,94	10,90	10,62	10,43	9,61	10,75	-3,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	67,36	65,57	64,87	64,11	64,45	64,69	64,68	65,10	-0,67
5. Perubahan Inventori	0,06	4,48	4,59	2,58	2,13	0,38	0,34	2,08	33,01
6. Ekspor	30,20	32,58	31,69	28,32	27,61	28,21	27,73	29,47	-1,42
7. Impor	60,40	65,15	63,38	56,60	55,23	53,71	51,62	58,01	-2,59
Net Ekspor	-30,20	-32,58	-31,69	-28,28	-27,62	-25,50	-23,89	-28,53	-3,83
PDRB PENGELUARAN	100,00								

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, data subsektor perhatikan Lampiran 2

4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pertumbuhan sektoral, terdapat 31 sektor/subsektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan di atas 5,00 persen atau tepatnya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang besarnya tahun 2017 diperkirakan mencapai paling tinggi 5,2 persen. Subsektor asuransi dan dana pensiun memiliki rata-rata pertumbuhan output per tahun tertinggi yaitu 12,78 persen dan disusul kemudian subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 12,17 persen. Untuk sektor industri

pengolahan, terdapat cukup banyak subsektor industri pengolahan yang memiliki rata-rata pertumbuhan di atas 5,00 persen. Sektor industri pengolahan secara keseluruhan memberikan kontribusi sekitar 7,50 persen dalam perekonomian Kota Surakarta dan proporsinya pun meski relatif kecil namun memiliki tren positif. Di bidang industri, cukup banyak subsektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan output tinggi, seperti: (a) industri kimia, farmasi dan obat tradisional (12,17 persen); (b) industri makanan dan minuman (8,92 persen); (c) industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (8,59 persen); (d) industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik (6,81 persen); (e) dan beberapa jenis industri lainnya seperti tabel di bawah.

Tabel 4.3.
Peringkat 10 Besar Rata-rata Pertumbuhan per tahun Sektor/Subsektor 2010-2016

No	Sektor/Subsektor	Rata-rata Pertumbuhan Output
1	Asuransi dan Dana Pensiun	12,78
2	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	12,17
3	Jasa Keuangan Lainnya	10,44
4	Jasa Penunjang Keuangan	9,31
5	Angkutan Rel	9,16
6	Industri Makanan dan Minuman	8,92
7	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,90
8	Jasa Perusahaan	8,69
9	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	8,59
10	Informasi dan Komunikasi	8,36

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, data rata-rata pertumbuhan per tahun di atas 5% perhatikan lampiran 3.

Dengan melihat proporsi dan pertumbuhan, dapat dijadikan sebagai indikasi adanya pergeseran struktur perekonomian di Kota Surakarta. Sektor perdagangan, industri, dan informasi merupakan sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Surakarta. Pertumbuhan output sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan misalnya dari tahun

ke tahun menunjukkan penurunan, sedangkan industri pengolahan dari 2010-2013 menunjukkan peningkatan namun setelah 2013 pertumbuhan output cenderung mengalami penurunan. Penurunan di sektor industri pengolahan tersebut terjadi pada semua subsektor. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor industri tekstil dan pakaian jadi, dari 15,10 persen di tahun 2013 menjadi hanya 2,52 persen di tahun 2014. Subsektor penyediaan akomodasi sejak 2011 hingga 2016 menunjukkan penurunan sementara subsektor penyediaan makan minum cenderung stabil. Persaingan yang semakin ketat di bidang tersebut merupakan salah satu faktor penyebab semakin menurunnya pertumbuhan subsektor penyediaan akomodasi.

Tabel 4.4.
Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Sektor Ekonomi 2011-2017
Atas Dasar Harga Konstan 2010

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,24	2,40	5,03	1,87	1,80	1,17	3,84	3,48
Pertambangan dan Penggalian	-5,32	-0,42	-0,41	-2,30	-2,62	-0,44	-0,39	-1,7
Industri Pengolahan	6,76	7,35	9,02	6,85	3,66	3,71	4,20	5,94
Pengadaan Listrik dan Gas	8,17	12,55	7,90	2,71	2,51	6,24	4,27	6,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,36	-2,54	-1,67	2,55	1,77	2,40	5,68	1,51
Konstruksi	1,91	5,45	3,92	3,65	5,36	6,43	4,96	4,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	10,45	2,06	7,44	4,27	4,11	4,55	5,49	5,48
Transportasi dan Pergudangan	4,54	6,44	10,32	8,38	8,38	5,31	5,70	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	7,82	5,73	6,95	6,18	5,09	4,41	6,33
Informasi dan Komunikasi	8,50	11,81	8,27	8,94	6,67	6,08	8,95	8,46
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,50	2,98	3,49	4,08	6,41	8,34	4,26	4,87
Real Estate	7,09	7,07	5,20	6,41	7,22	6,40	5,16	6,36
Jasa Perusahaan	11,19	7,18	9,36	6,86	9,28	8,34	3,97	8,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,81	1,66	3,88	1,23	6,46	2,34	1,24	2,80
Jasa Pendidikan	13,06	10,56	7,95	7,98	6,85	3,76	4,52	7,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,05	7,49	8,16	12,59	6,26	7,02	6,77	8,62
PDRB	6,42	5,58	6,25	5,28	5,44	5,32	5,33	5,66

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, data subsektor perhatikan Lampiran 4.

Secara keseluruhan pertumbuhan subsektor dari tahun ke tahun sangat fluktuatif. Kondisi ini terjadi bisa disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Kondisi perekonomian nasional dapat mempengaruhi kinerja perekonomian Kota Surakarta. Selain itu antara suatu sektor dengan sektor lainnya memiliki keterkaitan sehingga guncangan yang terjadi pada suatu sektor akan berdampak pada sektor lainnya. Pariwisata misalnya, bila memiliki kinerja yang kurang bagus akan berdampak pada berbagai sektor lain.

4.1.3. Kinerja Sektor Ekonomi

4.1.3.1. *Location Quotient (LQ)*

Analisis LQ merupakan analisis untuk melihat keunggulan suatu sektor atau subsektor secara relatif dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, seperti Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada dasarnya analisis ini untuk melihat posisi suatu sektor atau subsektor tertentu diantara sektor atau subsektor yang sama di seluruh wilayah. Implikasi lain adalah untuk melihat kemampuan suatu sektor atau subsektor untuk memenuhi kebutuhan internal wilayah.

Berdasarkan nilai LQ, semua subsektor pertanian memiliki nilai LQ di bawah 1. Kecilnya nilai LQ tersebut mengindikasikan bahwa usaha-usaha di bidang pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan internal Kota Surakarta, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain, misalnya Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Ngawi, dan sebagainya. Di sektor industri pengolahan nilai LQ secara keseluruhan hanya sekitar 0,22. Terdapat dua subsektor yang memiliki nilai LQ di atas satu, yaitu subsektor industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, serta subsektor industri kertas dan barang dari kertas,

percetakan. Tingginya nilai LQ menandakan bahwa di bidang kedua industri tersebut Kota Surakarta memiliki keunggulan di banding daerah lain di provinsi Jawa Tengah untuk jenis industri yang sama. Hal ini menjadikan Kota Surakarta mampu memenuhi kebutuhan dari kedua subsektor industri tersebut, serta mengekspor ke daerah lain. Subsektor industri dengan LQ sekitar 0,7 adalah industri karet, barang dari karet dan plastik serta subsektor industri tekstil dan pakaian jadi. Meski Kota Surakarta dikenal sebagai kota tekstil, namun output tekstil masih lebih rendah dibandingkan dengan output tekstil daerah lain di Jawa Tengah.

Sektor konstruksi serta perdagangan memiliki nilai LQ yang tinggi. Demikian pula dengan real estate, angkutan rel (kereta api), penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, serta kesehatan dan kegiatan sosial semuanya memiliki nilai LQ yang tinggi. Nilai LQ tertinggi adalah bidang penyediaan akomodasi. Kota Surakarta memiliki fasilitas akomodasi yang sangat memadai dengan tingkat hunian yang tinggi. Kondisi ini ditunjang dengan destinasi wisata mengingat Surakarta juga merupakan kota budaya.

Di dalam LQ dinamis, nilai untuk industri industri kimia, farmasi dan obat tradisional di atas 1 yang menandakan bahwa di bidang industri tersebut Surakarta memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula dengan beberapa bidang lain seperti industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri mesin dan perlengkapan; industri furniture; serta

industri pengolahan lainnya, jasa reparasi yang semuanya memiliki nilai LQ dinamis di atas 1. Bila LQ kurang dari 1 namun LQ dinamis lebih besar dari 1 (seperti industri pengolahan lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan) hal ini menggambarkan bahwa industri tersebut merupakan industri yang mampu memenuhi kebutuhan dalam Kota Surakarta, namun dibandingkan dengan daerah lain rata-rata pertumbuhannya masih lebih rendah.

Tabel 4.5.
Nilai LQ Statis dan LQ Dinamis 2010-2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010 s.d. 2016	LQ Dinamis
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,032	0,032	0,03	0,034	0,03	0,03	0,03	0,03	3,83
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	1,29
Pengadaan Listrik dan Gas	2,15	2,14	2,19	2,15	2,08	2,08	2,05	2,09	2,11	0,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,58	2,56	2,52	2,45	2,43	2,43	2,43	2,41	2,47	0,14
Konstruksi	2,73	2,69	2,66	2,61	2,59	2,58	2,57	2,52	2,61	0,25
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	1,62	1,63	1,63	1,66	1,65	1,65	1,64	1,62	1,64	1,07
Transportasi dan Pergudangan	0,88	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,85	0,86	0,86	0,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,62	1,64	1,67	1,67	1,66	1,66	1,63	1,60	1,64	0,83
Informasi dan Komunikasi	3,40	3,38	3,44	3,41	3,28	3,20	3,13	3,01	3,25	0,24
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,32	1,31	1,30	1,28	1,28	1,26	1,25	1,24	1,28	0,37
Real Estate	2,47	2,47	2,50	2,41	2,40	2,39	2,38	2,35	2,41	0,47
Jasa Perusahaan	2,22	2,23	2,23	2,15	2,13	2,15	2,10	2,01	2,14	0,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,04	2,021	2,04	2,04	2,05	2,07	2,07	2,04	2,05	1,49
Jasa Pendidikan	1,39	1,32	1,24	1,21	1,19	1,18	1,14	1,11	1,20	0,08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	1,31	1,28	1,27	1,29	1,28	1,25	1,23	1,27	0,48

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, nilai LQ subsektor perhatikan Lampiran 5.

4.1.3.2. Shift-Share

Dari tinjauan *shift-share*, hanya sedikit yang memiliki nilai negatif yaitu subsektor tanaman hortikultura, subsektor

kehutanan dan penebangan kayu, serta subsektor pertambangan dan penggalian. Semua sektor dan subsektor memiliki nilai regional share yang positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Jawa Tengah memberikan dampak positif bagi perekonomian Surakarta. Sebagai ilustrasi nilai regional shift industri pengolahan sebesar 593 milyar rupiah yang berarti kondisi perekonomian di Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi terhadap output sektor industri pengolahan di Surakarta sebesar 710 milyar rupiah. Sementara itu *proportional shift* menggambarkan pengaruh struktur ekonomi Kota Surakarta terhadap suatu sektor atau subsektor. Industri pengolahan misalnya memiliki nilai *proportional shift* sebesar 1,2 milyar rupiah. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian di Kota Surakarta mampu mendukung output industri sebesar 1,2 milyar rupiah.

Nilai *proportional shift* negatif terjadi di beberapa jenis industri yaitu industri pengolahan tembakau; industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, peralatan listrik; industri mesin dan perlengkapan; serta industri pengolahan lainnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa struktur perekonomian yang ada tidak memberikan pengembangan industri-industri tersebut. Untuk *differential shift*, cukup banyak yang memiliki nilai negatif yang berarti daya kompetitif bidang-bidang tersebut masih belum tinggi atau masih kalah dibandingkan yang sejenis di wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, meskipun kinerja

sektor-sektor tersebut dari aspek rata-rata pertumbuhan dan proporsi tergolong baik atau tinggi, namun dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Tengah masih kurang. Perkembangan yang terjadi masih dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Jawa Tengah serta struktur perekonomian Kota Surakarta, bukan karena daya kompetitifnya.

Secara keseluruhan, dinamika perekonomian Jawa Tengah memberikan dampak besar bagi perekonomian Kota Surakarta. Total nilai regional shift menunjukkan bahwa dari total output perekonomian Kota Surakarta yang tercermin melalui PDRB, sebesar 9,32 trilyun rupiah akibat pengaruh perekonomian Jawa Tengah dan 1,72 trilyun rupiah akibat struktur perekonomian internal Kota Surakarta.

Tabel 4.6.
Shift-Share Klasik 2010-2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010

LAPANGAN USAHA	Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Mij)	Differential Shift (Cij)	Shift Share (Dij)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46.769,42	(26.715,64)	8.810,40	28.864,18
Pertambangan dan Penggalian	260,32	55,08	(383,70)	(68,30)
Industri Pengolahan	710.954,07	1.269,93	98.133,50	810.357,50
Pengadaan Listrik dan Gas	20.450,96	4.705,39	(108,60)	25.047,75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.990,41	(13.434,94)	(2.340,51)	5.214,96
Konstruksi	2.633.491,58	32.291,45	(470.036,79)	2.195.746,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.222.038,58	(121.365,04)	201.163,47	2.301.837,00
Transportasi dan Pergudangan	246.037,36	94.779,75	1.894,82	342.711,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	454.080,06	83.249,56	23.049,65	560.379,27
Informasi dan Komunikasi	1.060.028,64	1.242.465,63	(439.099,10)	1.863.395,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	340.275,65	7.011,36	(39.322,73)	307.964,27
Real Estate	394.358,32	131.832,21	(36.114,13)	490.076,40
Jasa Perusahaan	59.261,80	56.538,86	(18.422,53)	97.378,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	602.965,39	(354.472,70)	46.075,53	294.568,21
Jasa Pendidikan	341.459,90	497.893,77	(298.394,54)	540.959,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79.622,82	73.789,34	(10.307,85)	143.104,31
PDRB	9.329.717,25	1.723.909,14	(960.197,22)	10.093.429,18

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, nilai shift share klasik subsektor perhatikan Lampiran 6.

Perhitungan *shift-share* dinamis memberikan gambaran apakah suatu subsektor tersebut terspesialisasi atau tidak, serta apakah suatu subsektor memiliki daya saing atau tidak dibandingkan dengan subsektor yang sama di Jawa Tengah. Nilai negatif efek spesialisasi menggambarkan bahwa subsektor tersebut bukan merupakan subsektor yang terspesialisasi di Surakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa subsektor tersebut belum menjadi subsektor yang “leading” dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Demikian pula dengan nilai efek kompetitif yang negatif memberikan gambaran bahwa subsektor tersebut memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan subsektor sejenis di Jawa Tengah. Dengan demikian, ada kemungkinan suatu subsektor tersebut merupakan subsektor yang terspesialisasi di Surakarta, namun daya saingnya rendah (nilai positif kecil) atau bahkan tidak memiliki daya saing (nilai negatif). Sebaliknya, ada kemungkinan suatu subsektor bukan merupakan sektor yang terspesialisasi di Surakarta, namun memiliki daya saing di bading subsektor sejenis di wilayah Jawa Tengah. Sektor yang ungula merupakan sektor yang memiliki efek spesialisais dan efek kompetitif yang keduanya positif.

Tabel 4.7.
Shift-Share Dinamis 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010

LAPANGAN USAHA	Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3.322.559	0,0819
Pertambangan dan Penggalian	-459.173	-0,6405
Industri Pengolahan	-5.775.907	0,0600
Pengadaan Listrik dan Gas	25.139	-0,0023
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.589	-0,0485
Konstruksi	3.840.867	-0,0776
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.955.105	0,0393
Transportasi dan Pergudangan	-76.098	0,0033

LAPANGAN USAHA	Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	398.233	0,0221
Informasi dan Komunikasi	1.721.869	-0,1800
Jasa Keuangan dan Asuransi	189.335	-0,0502
Real Estate	539.920	-0,0398
Jasa Perusahaan	74.957	-0,1351
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	706.661	0,0332
Jasa Pendidikan	222.453	-0,3797
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	42.121	-0,0563
PDRB	-0,00966	-1,4816

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, nilai shift share dinamsi perhatikan Lampiran 7.

4.1.3.3. Elastisitas dan Korelasi

Elastisitas merupakan ukuran untuk melihat perubahan PDRB yang disebabkan oleh perubahan komponen-komponennya. Tujuan utamanya untuk melihat seberapa besarkan tingkat kepekaan perubahan PDRB yang disebabkan oleh perubahan sektor ekonomi. Korelasi dimaksudkan untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara PDRB dengan komponen pembentuknya.

Nilai elastisitas ini dihitung berdasarkan rasio perubahan PDRB harga berlaku terhadap perubahan sektor dan subsektor selama 3 tahun terakhir dari 2010-2013. Nilai elastisitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perubahan suatu sektor atau subsektor memberikan dampak terhadap perubahan PDRB. Elastisitas sektoral dihitung dengan menggunakan elastisitas busur (Samuelson, 1995) sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\Delta \text{PDRB} / (\text{PDRB}_1 + \text{PDRB}_2) : 2}{\Delta \text{SEKTOR}_X / (\text{SEKTOR}_{X1} + \text{SEKTOR}_{X2}) : 2}$$

Hasil perhitungan elastisitas yang diukur dari 2010-2016 menunjukkan bahwa beberapa sektor dan subsektor yang memiliki nilai negatif, yaitu sektor dan subsektor tanaman pangan, kehutanan dan penebangan kayu, serta pertambangan dan penggalan. Nilai negatif ini merupakan indikasi bahwa sektor dan subsektor tersebut tidak memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB karena nilai negatif berarti perubahan subsektor berbanding terbalik dengan perubahan PDRB.

Untuk memperkuat hal tersebut, selain nilai elastisitas juga dilakukan perhitungan terhadap nilai koefisien korelasi antara PDRB dengan subsektor. Beberapa sektor dan subsektor memiliki nilai koefisien korelasi yang negatif. Hal ini merupakan indikasi bahwa: (1) nilai output sektor dan subsektor menunjukkan tren negatif, (2) nilai output sektor dan subsektor bersifat fluktuatif, dan (3) nilai output sektor dan subsektor positif namun fluktuatif. Semua sektor dan subsektor memiliki nilai elastisitas yang tinggi berkisar 0,80-0,90.

Nilai elastisitas 0,924 pada industri pengolahan misalnya mengandung arti bahwa apabila nilai output industri pengolahan naik 1 persen maka PDRB akan naik sebesar 0,924 persen. Dengan demikian, semakin tinggi nilai elastisitas semakin besar dampaknya terhadap PDRB. Meski demikian, tidak semua sektor atau subsektor yang memiliki elastisitas tinggi tersebut juga memiliki potensi yang besar untuk berkembang, seperti misal subsektor perkebunan.

Tabel 4.8.
Elastisitas dan Korelasi Komponen PDRB 2010-2016

Uraian	Elastisitas	Korelasi	Tren 2010-2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,66	0,96	Naik
Pertambangan dan Penggalian	-2,82	-0,95	Turun
Industri Pengolahan	0,92	0,99	Naik
Pengadaan Listrik dan Gas	0,87	0,98	Naik
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	6,99	0,55	Naik
Konstruksi	1,27	0,99	Naik
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil d	1,05	0,99	Naik
Transportasi dan Pergudangan	0,80	0,99	Naik
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,87	1,00	Naik
Informasi dan Komunikasi	0,70	1,00	Naik
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	1,00	Naik
Real Estate	0,88	1,00	Naik
Jasa Perusahaan	0,67	1,00	Naik
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,84	0,99	Naik
Jasa Pendidikan	0,70	0,99	Naik
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	1,00	Naik

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Selanjutnya, nilai elastisitas dan korelasi komponen PDRB subsektor perhatikan Lampiran 8.

4.1.3.4. Inflasi

Pada tahun 2016 inflasi di Kota Surakarta mencapai 2,15 persen. Angka ini sangat rendah bila dibandingkan dengan inflasi di tingkat provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Selama kurun waktu 2012-2016 inflasi tertinggi terjadi di tahun 2013, yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu kondisi perekonomian nasional dan global. Kelompok bahan makanan serta transportasi dan komunikasi menjadi penyumbang terbesar inflasi saat itu.

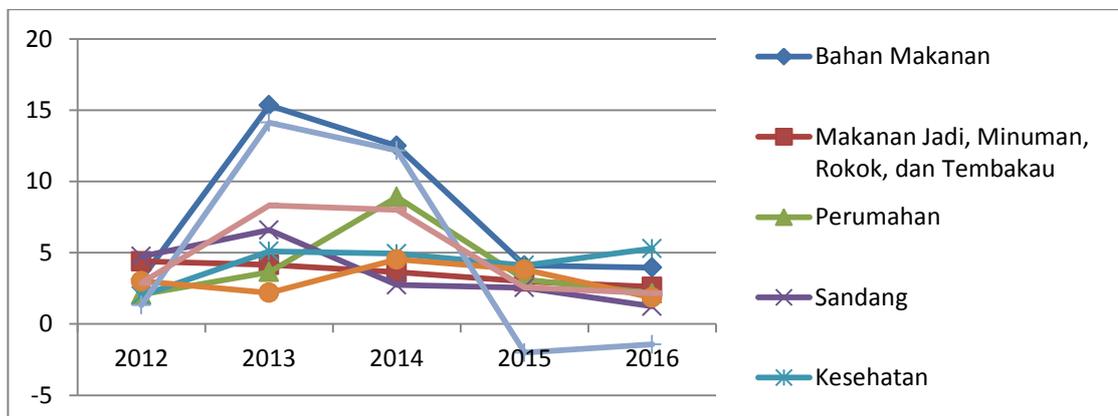
Dilihat dari faktor penyebabnya, inflasi di Surakarta tahun 2016 disebabkan oleh inflasi di kelompok kesehatan yang mencapai 5,29 persen. Untuk transportasi dan dan komunikasi pada tahun 2016 mengalami deflasi (-1,43 persen). Meskipun

pada tahun 2016 kelompok kesehatan memberikan andil terbesar dalam inflasi di Surakarta, namun bila dilihat selama 2012-2016 inflasi kelompok kesehatan dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga relatif stabil dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena sektor kesehatan dan pendidikan merupakan sektor yang mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harga terkendali.

Tabel 4.9.
Perkembangan Inflasi Kota Surakarta Menurut Kelompok Barang, 2012-2016

Kelompok Barang	2012	2013	2014	2015	2016
Bahan Makanan	3,14	15,34	12,49	4,1	3,96
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	4,4	4,15	3,63	2,98	2,6
Perumahan	2,07	3,65	8,91	3,12	2,16
Sandang	4,74	6,59	2,74	2,55	1,24
Kesehatan	1,98	5,1	4,93	4,11	5,29
Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	3,01	2,19	4,53	3,81	1,85
Transportasi dan Komunikasi	1,32	14,13	12,17	-2,01	-1,43
Umum	2,87	8,32	8,01	2,56	2,15

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka 2017, BPS.



Gambar 4.1.
Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Barang, 2012-2016

Dalam hal inflasi, Kota Surakarta memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari rata-rata inflasi selama 2008-2016 yang menunjukkan inflasi Kota Surakarta adalah yang terkecil yaitu 4,68 persen. Rata-rata inflasi tertinggi di Jawa Tengah terjadi di Kabupaten Kebumen yaitu 6,69 persen. Kondisi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengendalikan perekonomian dan sosial di Surakarta. Meski demikian, perbedaan rata-rata inflasi antar daerah di Jawa Tengah relatif sangat kecil. Seperti yang diketahui, pengendalian inflasi di daerah bukanlah hal yang mudah. Koordinasi kebijakan dan aksesibilitas barang dan jasa memegang peran yang sangat penting. Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sangat penting dalam mengendalikan laju inflasi agar daya beli masyarakat tidak terdampak secara besar.

Tabel 4.10.
Perbandingan Laju Inflasi 2008-2016

Wilayah Jateng	Inflasi									Rata-rata	Peringkat
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Kota Surakarta	6,96	2,63	6,65	1,93	2,87	8,32	8,01	2,56	2,15	4,68	1
Kabupaten Boyolali	6,51	2,05	7,34	3,35	3,45	8,21	7,45	2,58	2,65	4,84	2
Kota Tegal	8,52	5,83	6,73	2,58	0,4	5,8	7,4	3,95	2,71	4,88	3
Kabupaten Klaten	10,33	0,3	7,9	1,67	3,65	7,92	7,76	2,57	2,31	4,93	4
Kabupaten Batang	10,44	-0,04	6,62	3,01	3,83	8,08	7,66	2,94	2,24	4,98	5
Kota Semarang	10,34	3,19	7,11	2,87	0,41	8,19	8,53	2,56	2,32	5,06	6
Kabupaten Rembang	10,04	3,09	6,61	2,73	4,28	6,88	7,59	2,66	1,75	5,07	7
Kabupaten Pemalang	8,71	4,1	7,38	2,8	4,04	6,52	7,38	3,52	2,33	5,20	8
Kota Salatiga	10,2	3,28	6,65	2,84	4,12	7,67	7,84	2,61	2,19	5,27	9
Kabupaten Wonosobo	9,06	3,01	6,06	2,66	3,84	8,82	8,44	2,71	2,97	5,29	10
Kota Pekalongan	10,03	3,39	6,77	2,45	3,55	7,4	7,82	3,46	2,94	5,31	11
Kabupaten Karanganyar	10,83	2,96	7,26	3,31	3,29	8,7	7,38	2,4	1,93	5,34	12
Kabupaten Wonogiri	11,54	2,89	6,66	3	3,43	8,6	7,2	2,13	2,94	5,38	13
Kabupaten Sragen	10,82	2,82	6,77	2,86	3,74	7,55	8,51	3,05	2,49	5,40	14
Kabupaten Blora	12,79	2,91	7,17	2,26	3,55	7,94	7,13	2,85	2,14	5,42	15
Kabupaten Sukoharjo	11,39	2,59	6,67	2,63	4,22	8,42	7,93	2,69	2,34	5,43	16
Kabupaten Pekalongan	10,61	3,39	6,54	2,65	2,96	8,18	8,32	3,42	2,96	5,45	17
Kabupaten Kendal	12,74	1,23	5,89	3,49	3,89	6,9	8,34	4,13	2,47	5,45	18
Kabupaten Magelang	9,53	3,83	8,25	2,64	2,59	8,34	7,91	3,6	2,86	5,51	19

Wilayah Jateng	Inflasi									Rata-rata	Peringkat
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Kabupaten Banyumas	12,06	2,83	6,04	3,4	4,73	8,5	7,09	2,52	2,42	5,51	20
Kabupaten Pati	13,01	3,05	6,36	2,3	3,92	7,57	8,01	3,23	2,31	5,53	21
Kabupaten Tegal	9,57	4,5	6,44	2,74	4,13	7,79	8,48	3,64	2,67	5,55	22
Kota Magelang	9,53	3,48	6,8	4,15	-	7,79	7,92	2,7	2,25	5,58	23
Kabupaten Purworejo	11,28	3,98	7,56	2,52	3,66	7,14	8,48	3,45	2,66	5,64	24
Kabupaten Temanggung	12,36	4,16	7,35	2,42	4,73	7,01	7,81	2,74	2,42	5,67	25
Kabupaten Semarang	11,03	3,18	7,07	3,29	4,56	8,11	8,63	2,85	2,39	5,68	26
Kabupaten Brebes	11,81	4,25	6,04	3,09	4,61	9,83	6,2	3,08	2,84	5,75	27
Kabupaten Purbalingga	9,51	3,35	7,82	4,47	4,09	9,57	9,08	1,62	2,39	5,77	28
Kabupaten Demak	12,64	3,1	6,87	3,49	4,1	8,22	8,69	2,8	2,27	5,80	29
Kabupaten Kudus	11,99	3	7,65	3,34	4,77	8,31	8,59	3,28	2,32	5,92	30
Kabupaten Grobogan	13,59	4,26	7,45	1,86	4,48	7,88	8,03	3,31	2,41	5,92	31
Kabupaten Banjarnegara	11,09	4,37	7,13	4,73	4,55	8,35	7,78	2,97	2,87	5,98	32
Kabupaten Cilacap	9,97	4,63	5,65	5,27	6,87	8,37	8,19	2,63	2,77	6,04	33
Kabupaten Jepara	12,76	2,83	6,24	3,59	4,52	7,95	9,87	4,57	3,45	6,20	34
Kabupaten Kebumen	14,21	5,01	8,36	4,52	4,64	10,46	7,36	2,91	2,71	6,69	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

4.2. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja di Surakarta di Surakarta pada tahun 2017 mencapai 271.527. Sebagian besar angkatan kerja tersebut berpendidikan SMTA, yaitu 127.813 atau sebesar 47,07 persen dan yang terkecil berpendidikan diploma yaitu 17.512 atau 6,45 persen. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 12.133 orang merupakan pengangguran, sehingga tingkat pengangguran tahun 2017 mencapai 4,47 persen. Dari jumlah pengangguran yang ada, pengangguran terbesar adalah mereka yang berpendidikan SMTA, yaitu 6.797 atau 50,02 persen dari total jumlah penganggur. Jumlah lulusan sarjana yang menganggur di Kota Surakarta adalah 1.177 orang atau sebesar 9,70 persen dari total jumlah penganggur.

Tabel 4.11.

Angkatan Kerja Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan Tertinggi tahun 2017

Kegiatan	Pendidikan (Orang)					Jumlah
	SD	SMTP	SMTA	DI/II/III/ AKADEMI	UNIVERSITAS	
ANGKATAN KERJA	43.505	45.854	127.813	17.512	36.843	271.527
Bekerja	42.326	44.078	121.016	16.308	35.666	259.394
Pengangguran	1.179	1.776	6.797	1.204	1.177	12.133
BUKAN ANGKATAN KERJA	24.909	43.701	56.084	4.245	10.307	139.246
Sekolah	3.586	27.146	18.447	863	297	50.339
Mengurus Rumah Tangga	14.839	13.174	28.759	2.707	8.101	67.580
Lainnya	6.484	3.381	8.878	675	1.909	21.327
PENDUDUK USIA KERJA	68.414	89.555	183.897	21.757	47.150	410.773

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Dari sisi jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak sebagian besar penduduk yaitu 106.513 orang atau 41,06 persen berprofesi sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar dan yang terkecil adalah tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang mencapai 1.341 atau 0,52 persen. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Surakarta yang menyebabkan sulitnya sektor tersebut untuk berkembang. Dengan melihat banyaknya penduduk yang bekerja di bidang tenaga penjualan, tenaga usaha jasa, serta tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, maka Kota Surakarta dapat digambarkan sebagai kota perdagangan, jasa, dan industri yang didukung dengan bidang transportasi.

Tabel 4.12.

Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta, 2017

Jenis Pekerjaan/Jabatan	Pendidikan (Orang)					Total
	SD	SMTP	SMTA	Diploma I/II/III/ Akademi	Universitas	
Tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis	0	518	6.019	3.796	14.609	24.942
Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan	0	596	741	435	670	2.442
Tenaga tata usaha dan yang sejenis	685	1.357	8.883	3.312	5.663	19.900
Tenaga usaha penjualan	11.137	6.308	32.187	3.524	9.556	62.712
Tenaga usaha jasa	11.338	5.994	16.172	1.001	1.756	36.261
Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	0	0	454	280	607	1.341

Jenis Pekerjaan/Jabatan	Pendidikan (Orang)					Total
	SD	SMTP	SMTA	Diploma	Universitas	
				I/II/III/ Akademi		
Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar	18.272	28.629	52.847	3.960	2.805	106.513
Lainnya	894	676	3.713	0	0	5.283
Jumlah	42.326	44.078	121.016	16.308	35.666	259.394

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Bila dikaitkan dengan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan lapangan usaha atau sektor ekonomi, maka terlihat sebagian besar penduduk yaitu 100.971 atau 38,93 persen bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, selanjutnya sektor jasa kemasyarakatan yaitu sebesar 65.854 atau 25,39 persen dan urutan ketiga adalah sektor industri pengolahan yaitu 54.184 atau 20,89 persen.

Di sektor industri pengolahan, sebagian besar adalah pekerja yang berpendidikan SMTA. Demikian pula dengan sektor jasa kemasyarakatan dan sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebagian besar adalah berpendidikan SMTA. Mereka yang berpendidikan sarjana sebagian besar bekerja di sektor jasa kemasyarakatan dan disusul kemudian sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel. Sementara itu mereka yang berpendidikan SD sebagian besar bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.

Tabel 4.13.
Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Lapangan Usaha, 2017

Lapangan Usaha	Pendidikan (Orang)					Total
	SD	SMTP	SMTA	Diploma	Universitas	
				I/II/III/ Akademi		
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	0	0	454	280	607	1.341
Pertambangan dan penggalian	0	0	0	438	0	438
Industri Pengolahan	5.378	11.616	30.636	2.071	4.483	54.184
Listrik, gas dan air	0	0	1.601	0	0	1.601
Bangunan	1.940	3.151	1.559	263	0	6.913
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	18.482	14.822	51.601	5.891	10.175	100.971

Lapangan Usaha	Pendidikan (Orang)					Total
	SD	SMTP	SMTA	Diploma	Universitas	
				I/II/III/ Akademi		
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	2.269	2.922	6.187	1.292	1.224	13.894
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	603	2.185	3.159	2.026	6.225	14.198
Jasa kemasyarakatan	13.654	9.382	25.819	4.047	12.952	65.854
Jumlah	42.326	44.078	121.016	16.308	35.666	259.394

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk pemerintah daerah. Pengangguran akan mendorong timbulnya permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang ditempuh harus diarahkan pada upaya pengurangan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja akan mendorong peningkatan tingkat pengangguran, namun bila kenaikan jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kenaikan jumlah pengangguran, maka tingkat pengangguran akan turun.

Tabel 4.14.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran (%)	Peringkat
Kabupaten Semarang	1,78	1
Kabupaten Sukoharjo	2,27	2
Kabupaten Wonogiri	2,38	3
Kabupaten Magelang	2,44	4
Kabupaten Blora	2,85	5
Kabupaten Temanggung	2,97	6
Kabupaten Grobogan	3,02	7
Kabupaten Karanganyar	3,17	8
Kabupaten Rembang	3,19	9
Kabupaten Kudus	3,56	10
Kabupaten Purworejo	3,64	11
Kabupaten Boyolali	3,67	12
Kabupaten Pati	3,83	13

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran (%)	Peringkat
Kota Salatiga	3,96	14
Kabupaten Wonosobo	4,18	15
Kabupaten Klaten	4,35	16
Kabupaten Pekalongan	4,39	17
Kota Surakarta	4,47	18
Kabupaten Demak	4,47	19
Kabupaten Sragen	4,55	20
Kabupaten Banyumas	4,62	21
Kabupaten Banjarnegara	4,72	22
Kabupaten Jepara	4,84	23
Kabupaten Kendal	4,93	24
Kota Pekalongan	5,05	25
Kabupaten Purbalingga	5,33	26
Kabupaten Kebumen	5,58	27
Kabupaten Pemalang	5,59	28
Kabupaten Batang	5,82	29
Kabupaten Cilacap	6,30	30
Kota Semarang	6,61	31
Kota Magelang	6,68	32
Kabupaten Tegal	7,33	33
Kabupaten Brebes	8,04	34
Kota Tegal	8,19	35

Sumber: Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017, diolah

Tingkat pengangguran di Surakarta pada tahun 2017 mencapai 4,47 persen. Jumlah ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah dan nasional. Bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, posisi Surakarta berada di tengah-tengah yaitu peringkat 18 dari 35.

4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit, yaitu indeks yang dihitung dari beberapa indeks lainnya, yaitu angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), serta pengeluaran perkapita (PPK). Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah.

Tabel 4.15.
Perbandingan Angka Harapan Hidup 2010-2016

KAB/KOTA	RATA-RATA AHH	PERINGKAT	KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN AHH	PERINGKAT
Kabupaten Sukoharjo	77.43	1	Kabupaten Brebes	0.28	1
Kota Semarang	77.18	2	Kabupaten Wonosobo	0.19	2
Kota Surakarta	76.95	3	Kabupaten Tegal	0.17	3
Kabupaten Karanganyar	76.79	4	Kabupaten Purworejo	0.16	4
Kota Salatiga	76.61	5	Kabupaten Cilacap	0.15	5
Kota Magelang	76.52	6	Kabupaten Kebumen	0.14	6
Kabupaten Klaten	76.49	7	Kabupaten Pemalang	0.14	7
Kabupaten Kudus	76.38	8	Kabupaten Banjarnegara	0.14	8
Kabupaten Wonogiri	75.76	9	Kabupaten Grobogan	0.13	9
Kabupaten Jepara	75.62	10	Kabupaten Banyumas	0.13	10
Kabupaten Boyolali	75.55	11	Kabupaten Karanganyar	0.11	11
Kabupaten Semarang	75.47	12	Kabupaten Pati	0.10	12
Kabupaten Pati	75.43	13	Kota Salatiga	0.08	13
Kabupaten Temanggung	75.29	14	Kabupaten Sragen	0.08	14
Kabupaten Sragen	75.26	15	Kabupaten Blora	0.08	15
Kabupaten Demak	75.15	16	Kota Tegal	0.08	16
Kabupaten Batang	74.36	17	Kabupaten Magelang	0.08	17
Kabupaten Rembang	74.13	18	Kabupaten Pekalongan	0.08	18
Kabupaten Kendal	74.08	19	Kabupaten Purbalingga	0.07	19
Kabupaten Grobogan	74.05	20	Kabupaten Rembang	0.07	20
Kota Pekalongan	74.04	21	Kabupaten Wonogiri	0.07	21
Kota Tegal	74.03	22	Kabupaten Kendal	0.06	22
Kabupaten Purworejo	73.78	23	Kabupaten Boyolali	0.06	23
Kabupaten Blora	73.74	24	Kota Pekalongan	0.05	24
Kabupaten Banjarnegara	73.36	25	Kabupaten Batang	0.05	25
Kabupaten Pekalongan	73.26	26	Kota Magelang	0.05	26
Kabupaten Magelang	73.18	27	Kabupaten Demak	0.05	27
Kabupaten Banyumas	72.91	28	Kabupaten Temanggung	0.05	28
Kabupaten Cilacap	72.76	29	Kabupaten Klaten	0.05	29
Kabupaten Purbalingga	72.73	30	Kota Surakarta	0.04	30
Kabupaten Kebumen	72.57	31	Kabupaten Semarang	0.03	31
Kabupaten Pemalang	72.57	32	Kabupaten Kudus	0.02	32
Kabupaten Wonosobo	70.75	33	Kabupaten Jepara	0.02	33
Kabupaten Tegal	70.69	34	Kabupaten Sukoharjo	0.02	34
Kabupaten Brebes	67.81	35	Kota Semarang	0.01	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pada ukuran AHH, Kota Surakarta menempati peringkat 3 dari 35 daerah di seluruh Jawa Tengah dengan skor 76,95. Skor tertinggi AHH adalah Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 77,43. Dengan demikian aspek kesehatan dasar di Kota Surakarta sudah terlaksana dengan sangat baik. Dari sisi pertumbuhan AHH selama 2010-2016, rata-rata skor AHH Kota Surakarta tumbuh sebesar 0,04 persen per tahun. Angka ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan daerah lain.

Dari sisi HLS, kota Surakarta juga menempati peringkat ketiga dari 35 daerah di Jawa Tengah dengan skor 13,74. HLS merupakan ukuran untuk melihat

lamanya sekolah yang diharapkan pada umur tertentu. Nilai HLS Kota Surakarta ini hanya berselisih sedikit dengan nilai HLS Kota Salatiga yang memiliki skor 14,75. Meski nilai HLS Kota Surakarta tinggi, namun pertumbuhan nilai HLS dari tahun ke tahun tergolong kecil yaitu 1,62 persen, peringkat ke 30 dari 35 daerah di Jawa Tengah.

Tabel 4.16.
Perbandingan Harapan Lama Sekolah 2010-2016

KAB/KOTA	RATA-RATA HLS	PERINGKAT	KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN HLS	PERINGKAT
Kota Salatiga	14.75	1	Kabupaten Kudus	2.79	1
Kota Semarang	13.77	2	Kabupaten Temanggung	2.76	2
Kota Surakarta	13.74	3	Kabupaten Grobogan	2.71	3
Kabupaten Sukoharjo	12.92	4	Kabupaten Banjarnegara	2.69	4
Kabupaten Karanganyar	12.83	5	Kabupaten Wonosobo	2.68	5
Kabupaten Purworejo	12.81	6	Kota Pekalongan	2.58	6
Kota Magelang	12.76	7	Kabupaten Cilacap	2.56	7
Kabupaten Semarang	12.47	8	Kabupaten Pemalang	2.48	8
Kabupaten Klaten	12.38	9	Kabupaten Pekalongan	2.46	9
Kabupaten Kudus	12.23	10	Kota Tegal	2.43	10
Kabupaten Banyumas	12.18	11	Kabupaten Batang	2.37	11
Kabupaten Jepara	11.94	12	Kabupaten Kebumen	2.24	12
Kabupaten Kebumen	11.92	13	Kabupaten Brebes	2.21	13
Kabupaten Sragen	11.81	14	Kabupaten Kendal	2.14	14
Kota Tegal	11.80	15	Kabupaten Rembang	2.13	15
Kabupaten Wonogiri	11.78	16	Kabupaten Karanganyar	2.12	16
Kabupaten Kendal	11.78	17	Kabupaten Demak	2.10	17
Kota Pekalongan	11.71	18	Kabupaten Tegal	2.09	18
Kabupaten Demak	11.69	19	Kabupaten Magelang	1.95	19
Kabupaten Cilacap	11.63	20	Kabupaten Pati	1.93	20
Kabupaten Grobogan	11.62	21	Kota Semarang	1.91	21
Kabupaten Magelang	11.56	22	Kabupaten Wonogiri	1.83	22
Kabupaten Boyolali	11.54	23	Kabupaten Purbalingga	1.81	23
Kabupaten Tegal	11.47	24	Kabupaten Sukoharjo	1.75	24
Kabupaten Pekalongan	11.47	25	Kota Magelang	1.74	25
Kabupaten Blora	11.40	26	Kabupaten Blora	1.74	26
Kabupaten Rembang	11.31	27	Kabupaten Sragen	1.63	27
Kabupaten Temanggung	11.29	28	Kota Surakarta	1.62	28
Kabupaten Purbalingga	11.26	29	Kabupaten Boyolali	1.49	29
Kabupaten Pati	11.17	30	Kabupaten Semarang	1.39	30
Kabupaten Pemalang	11.05	31	Kabupaten Jepara	1.34	31
Kabupaten Wonosobo	10.91	32	Kabupaten Klaten	1.30	32
Kabupaten Brebes	10.78	33	Kabupaten Banyumas	1.23	33
Kabupaten Batang	10.64	34	Kabupaten Purworejo	1.05	34
Kabupaten Banjarnegara	10.55	35	Kota Salatiga	0.48	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Dari ukuran RLS, Kota Surakarta memiliki nilai 10,21 tahun dan masuk dalam peringkat ke 2 dari 35 daerah di Jawa Tengah. Angka ini sama dengan Kota Magelang yang memiliki nilai RLS sebesar 10,21. Angka ini menunjukkan jumlah

tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Meski memiliki nilai RLS yang tinggi, namun kenaikan dari tahun ke tahun termasuk kecil yaitu rata-rata hanya 0,62 persen per tahun tatau masuk dalam peringkat 33.

Tabel 4.17.
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah 2010-2016

KAB/KOTA	RATA-RATA RLS	PERINGKAT	KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN RLS	PERINGKAT
Kota Magelang	10.21	1	Kabupaten Pemalang	3.44	1
Kota Surakarta	10.21	2	Kabupaten Brebes	3.26	2
Kota Semarang	10.04	3	Kabupaten Wonogiri	2.76	3
Kota Salatiga	9.30	4	Kabupaten Karanganyar	2.64	4
Kabupaten Sukoharjo	8.20	5	Kabupaten Tegal	2.41	5
Kabupaten Karanganyar	8.05	6	Kabupaten Magelang	2.29	6
Kota Tegal	7.98	7	Kabupaten Batang	2.24	7
Kota Pekalongan	7.97	8	Kabupaten Demak	2.17	8
Kabupaten Klaten	7.74	9	Kabupaten Kebumen	2.14	9
Kabupaten Kudus	7.68	10	Kabupaten Blora	2.02	10
Kabupaten Purworejo	7.55	11	Kabupaten Rembang	2.01	11
Kabupaten Semarang	7.28	12	Kabupaten Pati	1.96	12
Kabupaten Banyumas	7.14	13	Kabupaten Jepara	1.95	13
Kabupaten Demak	7.11	14	Kabupaten Klaten	1.93	14
Kabupaten Jepara	7.03	15	Kabupaten Sukoharjo	1.91	15
Kabupaten Magelang	6.93	16	Kota Tegal	1.75	16
Kabupaten Boyolali	6.74	17	Kota Salatiga	1.73	17
Kabupaten Rembang	6.61	18	Kabupaten Pekalongan	1.70	18
Kabupaten Purbalingga	6.60	19	Kabupaten Boyolali	1.65	19
Kabupaten Sragen	6.58	20	Kabupaten Purbalingga	1.65	20
Kabupaten Kebumen	6.58	21	Kabupaten Cilacap	1.64	21
Kabupaten Cilacap	6.46	22	Kabupaten Sragen	1.62	22
Kabupaten Kendal	6.42	23	Kabupaten Temanggung	1.50	23
Kabupaten Pati	6.36	24	Kota Semarang	1.47	24
Kabupaten Pekalongan	6.30	25	Kota Pekalongan	1.46	25
Kabupaten Grobogan	6.29	26	Kabupaten Kendal	1.42	26
Kabupaten Temanggung	6.21	27	Kabupaten Banyumas	1.35	27
Kabupaten Wonogiri	6.08	28	Kabupaten Grobogan	1.29	28
Kabupaten Wonosobo	5.97	29	Kabupaten Banjarnegara	1.16	29
Kabupaten Tegal	5.97	30	Kabupaten Kudus	0.88	30
Kabupaten Banjarnegara	5.96	31	Kabupaten Wonosobo	0.87	31
Kabupaten Batang	5.96	32	Kabupaten Semarang	0.83	32
Kabupaten Blora	5.89	33	Kota Surakarta	0.62	33
Kabupaten Pemalang	5.62	34	Kabupaten Purworejo	0.60	34
Kabupaten Brebes	5.61	35	Kota Magelang	0.34	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Selanjutnya dari komponen pengeluaran perkapita, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Surakarta selama 2010-2016 mencapai 12,98 juta rupiah per orang per tahun. Angka ini tergolong tinggi, sehingga menempatkan Kota Surakarta di peringkat kedua dari 35 daerah di Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan per tahun pengeluaran perkapita Kota Surakarta juga tergolong

tinggi, yaitu 2,31 persen per tahun, peringkat ke 11. Dengan demikian tingkat kesejahteraan penduduk Kota Surakarta selama 2010-2016 termasuk tinggi. Menurut BPS, nilai tertinggi pengeluaran riil yang sudah disesuaikan hingga 2025 diproyeksikan 26,5 juta rupiah per orang per tahun.

Tabel 4.18.
Perbandingan Pengeluaran Perkapita Riil Antar Daerah, 2010-2016

KAB/KOTA	RATA-RATA PENGELUARAN (Rp Ribu/orang/tahun)	PERINGKAT	KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PERINGKAT
Kota Salatiga	14,120.74	1	Kabupaten Banjarnegara	3.26	1
Kota Surakarta	12,928.40	2	Kabupaten Pemalang	2.94	2
Kota Semarang	12,822.92	3	Kabupaten Batang	2.77	3
Kabupaten Boyolali	11,480.11	4	Kabupaten Banyumas	2.75	4
Kota Tegal	11,341.80	5	Kabupaten Magelang	2.73	5
Kota Pekalongan	10,920.29	6	Kabupaten Tegal	2.68	6
Kabupaten Sragen	10,889.39	7	Kota Semarang	2.51	7
Kabupaten Klaten	10,873.81	8	Kabupaten Temanggung	2.43	8
Kabupaten Semarang	10,521.01	9	Kabupaten Purbalingga	2.43	9
Kota Magelang	10,322.41	10	Kabupaten Sragen	2.36	10
Kabupaten Karanganyar	10,247.63	11	Kota Surakarta	2.31	11
Kabupaten Sukoharjo	10,150.43	12	Kota Pekalongan	2.30	12
Kabupaten Kendal	10,031.97	13	Kota Magelang	2.29	13
Kabupaten Kudus	9,989.14	14	Kabupaten Wonogiri	2.16	14
Kabupaten Banyumas	9,636.58	15	Kabupaten Kendal	2.15	15
Kabupaten Wonosobo	9,467.61	16	Kabupaten Cilacap	2.14	16
Kabupaten Grobogan	9,196.41	17	Kabupaten Jepara	2.12	17
Kabupaten Jepara	9,134.54	18	Kabupaten Rembang	2.01	18
Kabupaten Purworejo	9,101.34	19	Kabupaten Boyolali	1.98	19
Kabupaten Pati	9,069.79	20	Kabupaten Kebumen	1.96	20
Kabupaten Cilacap	9,068.56	21	Kabupaten Semarang	1.88	21
Kabupaten Rembang	8,936.90	22	Kabupaten Pati	1.87	22
Kabupaten Demak	8,936.24	23	Kabupaten Demak	1.81	23
Kabupaten Pekalongan	8,865.70	24	Kota Tegal	1.80	24
Kabupaten Brebes	8,719.46	25	Kabupaten Blora	1.76	25
Kabupaten Purbalingga	8,539.85	26	Kabupaten Pekalongan	1.70	26
Kabupaten Blora	8,473.19	27	Kota Salatiga	1.67	27
Kabupaten Wonogiri	8,158.17	28	Kabupaten Karanganyar	1.66	28
Kabupaten Temanggung	8,029.57	29	Kabupaten Purworejo	1.63	29
Kabupaten Tegal	8,023.32	30	Kabupaten Grobogan	1.50	30
Kabupaten Batang	7,927.88	31	Kabupaten Wonosobo	1.50	31
Kabupaten Magelang	7,828.04	32	Kabupaten Kudus	1.48	32
Kabupaten Kebumen	7,747.35	33	Kabupaten Brebes	1.45	33
Kabupaten Banjarnegara	7,647.24	34	Kabupaten Klaten	1.39	34
Kabupaten Pemalang	6,838.52	35	Kabupaten Sukoharjo	1.36	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan komponen masing-masing IPM yang telah diuraikan, diperoleh nilai IPM yang merupakan gabungan dari 4 komponen IPM di atas. Dari data yang ada, rata-rata nilai IPM Kota Surakarta selama 2010-2016 adalah 79,00 dan ini menjadikan Kota Surakarta menempati peringkat kedua selama periode

tersebut. Peringkat pertama adalah Kota Salatiga dengan rata-rata nilai IPM 79,67. Meskipun nilai IPM Kota Surakarta tinggi, namun perlu diperhatikan bahwa kenaikan nilai IPM dari tahun ke tahun selama 2010-2016 hanya 0,70 persen per tahun.

Tabel 4.19.
Perbandingan IPM 2010-2016

KAB/KOTA	RATA-RATA IPM	PERINGKAT	KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN IPM	PERINGKAT
Kota Salatiga	79.67	1	Kabupaten Pemalang	1.51	1
Kota Surakarta	79.00	2	Kabupaten Banjarnegara	1.28	2
Kota Semarang	78.85	3	Kabupaten Batang	1.24	3
Kota Magelang	75.44	4	Kabupaten Tegal	1.24	4
Kabupaten Sukoharjo	73.32	5	Kabupaten Brebes	1.22	5
Kabupaten Karanganyar	72.85	6	Kabupaten Magelang	1.17	6
Kabupaten Klaten	72.43	7	Kabupaten Temanggung	1.16	7
Kota Tegal	71.46	8	Kabupaten Cilacap	1.12	8
Kabupaten Kudus	71.27	9	Kabupaten Kebumen	1.11	9
Kabupaten Semarang	71.15	10	Kabupaten Wonogiri	1.10	10
Kota Pekalongan	70.97	11	Kabupaten Karanganyar	1.06	11
Kabupaten Boyolali	70.21	12	Kota Pekalongan	1.03	12
Kabupaten Sragen	69.67	13	Kabupaten Rembang	1.02	13
Kabupaten Purworejo	69.66	14	Kabupaten Pekalongan	1.01	14
Kabupaten Jepara	68.83	15	Kabupaten Demak	1.00	15
Kabupaten Banyumas	68.65	16	Kabupaten Grobogan	1.00	16
Kabupaten Demak	68.23	17	Kota Tegal	0.99	17
Kabupaten Kendal	68.12	18	Kabupaten Purbalingga	0.99	18
Kabupaten Grobogan	66.88	19	Kabupaten Pati	0.97	19
Kabupaten Pati	66.85	20	Kabupaten Wonosobo	0.96	20
Kabupaten Rembang	66.71	21	Kabupaten Kendal	0.95	21
Kabupaten Cilacap	66.44	22	Kabupaten Blora	0.93	22
Kabupaten Wonogiri	66.22	23	Kabupaten Sragen	0.91	23
Kabupaten Pekalongan	66.02	24	Kota Semarang	0.90	24
Kabupaten Magelang	65.63	25	Kabupaten Banyumas	0.88	25
Kabupaten Purbalingga	65.59	26	Kabupaten Kudus	0.88	26
Kabupaten Temanggung	65.47	27	Kabupaten Jepara	0.85	27
Kabupaten Kebumen	65.20	28	Kabupaten Boyolali	0.81	28
Kabupaten Blora	65.09	29	Kabupaten Sukoharjo	0.81	29
Kabupaten Wonosobo	64.49	30	Kabupaten Klaten	0.74	30
Kabupaten Batang	63.83	31	Kota Magelang	0.70	31
Kabupaten Tegal	63.47	32	Kota Surakarta	0.70	32
Kabupaten Banjarnegara	62.97	33	Kabupaten Semarang	0.66	33
Kabupaten Brebes	61.79	34	Kabupaten Purworejo	0.60	34
Kabupaten Pemalang	61.59	35	Kota Salatiga	0.58	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

4.4. Kinerja Keuangan Daerah

4.4.1. Pendapatan Daerah

Dalam kurun waktu 2015-2017, total realisasi pendapatan dalam APBD mengalami kenaikan sebesar 15,01 persen dari 1,568 trilyun rupiah

menjadi 1,803 triliun rupiah, atau naik sebesar 5,93 persen dibandingkan tahun 2016. Pendapatan daerah terdiri dari 3 komponen utama yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen utama tersebut, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki kenaikan tertinggi selama 2016-2017 yaitu 31,43 persen atau dari 173 milyar rupiah di tahun 2016 menjadi 228 milyar rupiah di tahun 2017. Komponen dana perimbangan menunjukkan penurunan yang selama 2016-2017 yaitu -5,03 persen. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan yang dalam semua subkomponen dana perimbangan. Pada komponen PAD, subkomponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan tingkat kenaikan yang tertinggi yaitu 175,12 persen, sedangkan subkomponen retribusi daerah menunjukkan tingkat kenaikan yang terkecil yaitu 3,16 persen. Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, subkomponen dana penyesuaian dan otonomi khusus menunjukkan kenaikan yang sangat besar selama 2016-2017 yaitu 936,93 persen atau naik dari 5,002 milyar rupiah menjadi 51.871 milyar rupiah.

Dari sisi proporsinya, pendapatan daerah Kota Surakarta masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai 64,82 persen di tahun 2016, naik dibanding tahun 2015 yang mencapai 48,18 persen. Namun pada tahun 2017 proporsi dana perimbangan kembali turun menjadi 58,10 persen. Untuk komponen selain dana perimbangan seperti PAD, tahun 2016 PAD memiliki proporsi 24,99 persen, dan pada tahun 2017 naik menjadi 29,44 persen. Dengan demikian tren proporsi PAD sejak tahun 2015 menunjukkan kenaikan karena proporsi pada tahun 2015 adalah 23,77 persen. Melihat struktur pendapatan yang ada, tingkat kemandirian keuangan Kota Surakarta tergolong cukup tinggi bila melihat proporsi PAD.

Tabel 4.20.
Struktur dan Pertumbuhan Pendapatan 2015-2017

KETERANGAN	2015	2016	2017	PROPORSI			KENAIKAN (%) 2016-2017
				2015	2016	2017	
PENDAPATAN	1.568.482.686.616	1.703.003.847.995	1.803.915.423.159	100,00	100,00	100,00	5,93
Pendapatan Asli Daerah	372.798.426.790	425.502.779.064	527.538.846.222	23,77	24,99	29,24	23,98
Pajak Daerah	233.085.404.386	252.052.998.369	288.417.472.037	14,86	14,80	15,99	14,43
Retribusi Daerah	51.234.923.568	59.650.828.203	61.536.951.057	3,27	3,50	3,41	3,16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.584.189.359	7.290.937.952	20.058.584.208	0,48	0,43	1,11	175,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	80.893.909.477	106.508.014.539	157.525.838.920	5,16	6,25	8,73	47,90
Dana Perimbangan	755.728.419.465	1.103.859.741.264	1.048.161.106.387	48,18	64,82	58,10	-5,05
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	38.677.463.465	65.599.599.264	50.601.936.437	2,47	3,85	2,81	-22,86
Dana Alokasi Umum	713.300.856.000	841.536.122.000	826.753.038.000	45,48	49,41	45,83	-1,76
Dana Alokasi Khusus	3.750.100.000	196.724.020.000	170.806.131.950	0,24	11,55	9,47	-13,17
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	439.955.840.361	173.641.327.667	228.215.470.550	28,05	10,20	12,65	31,43
Pendapatan Hibah	-	1.443.754.749	2.709.000.000	0,00	0,08	0,15	87,64
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	129.786.943.361	148.855.647.918	153.771.939.550	8,27	8,74	8,52	3,30
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	275.572.129.000	5.002.425.000	51.871.631.000	17,57	0,29	2,88	936,93
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	34.596.768.000	18.339.500.000	19.862.900.000	2,21	1,08	1,10	8,31

Sumber: Pemerintah Kota Surakarta 2018, diolah.

4.4.2. Belanja Daerah

Tabel 4.21.
Struktur dan pertumbuhan Belanja Daerah 2015-2017

KETERANGAN	2015	2016	2017	PROPORSI			KENAIKAN (%) 2016-2017
				2015	2016	2017	
BELANJA	1.532.527.097.064	1.680.456.921.161	1.768.346.964.316	100,00	100,00	100,00	5,23
Belanja Tidak Langsung	902.326.378.106	922.713.441.467	737.482.501.879	58,88	54,91	41,70	-20,07
Belanja Pegawai	839.220.621.613	870.396.541.669	660.749.236.080	54,76	51,80	37,37	-24,09
Belanja Bunga	543.941.049	441.570.521	336.644.278	0,04	0,03	0,02	-23,76
Belanja Hibah	57.298.323.252	47.969.414.000	55.468.336.550	3,74	2,85	3,14	15,63
Belanja Bantuan Sosial	4.310.500.000	3.153.707.303	19.934.438.387	0,28	0,19	1,13	532,10
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	677.113.524	731.712.896	859.901.120	0,04	0,04	0,05	17,52
Belanja Tidak Terduga	275.878.668	20.495.078	133.945.464	0,02	0,00	0,01	553,55
Belanja Langsung	630.200.718.958	757.743.479.694	1.030.864.462.437	41,12	45,09	58,30	36,04
Belanja Pegawai	34.057.188.790	27.733.214.456	43.998.644.864	2,22	1,65	2,49	58,65
Belanja Barang dan Jasa	360.313.939.466	422.475.910.668	517.280.076.934	23,51	25,14	29,25	22,44
Belanja Modal	235.829.590.702	307.534.354.570	469.585.740.639	15,39	18,30	26,56	52,69
SURPLUS/DEFISIT	35.955.589.552	22.546.926.834	35.568.458.843	2,35	1,34	2,01	57,75

Sumber: Pemerintah Kota Surakarta 2018, diolah.

Bila pendapatan menunjukkan kenaikan 5,93 persen selama 2016-2017, maka belanja daerah menunjukkan kenaikan yang lebih rendah yaitu 5,23 persen pada periode yang sama. Komponen belanja daerah terdiri dari dua komponen utama, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada komponen belanja langsung, subkomponen belanja modal menunjukkan tingkat kenaikan tertinggi selama 2016-2017 yaitu 52,69 persen. Tingginya kenaikan komponen ini menunjukkan bahwa alokasi belanja Kota Surakarta diarahkan pada pengeluaran yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Pada komponen belanja tidak langsung, subkomponen belanja tak terduga menunjukkan tingkat kenaikan tertinggi yaitu sebesar 553,55 persen dari 20 juta rupiah

menjadi 134 juta rupiah sementara subkomponen belanja bantuan social menunjukkan kenaikan yang juga sangat tinggi selama 2016-2017 yaitu 532,10 persen dari 3,1 milyar rupiah menjadi 20 milyar rupiah. Meskipun kenaikannya sangat tinggi, namun dari sisi proporsi kedua subkomponen tersebut memiliki proporsi yang sangat kecil sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap APBD.

Dari sisi struktur belanja daerah, belanja pegawai memiliki proporsi tertinggi yaitu 41,70 persen di tahun 2017. Proporsi ini menurun bila dibandingkan tahun 2017 yang besarnya 54,91 persen. Sementara itu subkomponen belanja barang dan jasa tahun 2017 memiliki proporsi 29,25 persen dan belanja modal memiliki proporsi 26,52 persen. Berdasarkan proporsi di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan APBD Kota Surakarta telah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai instrumen. Hal yang perlu diperhatikan adalah penentuan skala prioritas APBD melalui penentuan skala prioritas program yang disusun oleh masing-masing SKPD.

4.4.3. Rasio Keuangan Daerah

Pada tahun 2016 rasio kemandirian Kota Surakarta mencapai 32,77 persen. Hal ini mengandung arti peran PAD dibandingkan dengan dana eksternal masih tergolong kecil. Untuk rasio ketergantungan, nilai Kota Surakarta adalah 73,85 yang berarti dari pendapatan yang ada, 73,85 persen bersumber dari dana transfer. Demikian juga dengan derajat desentralisasi yang menunjukkan angka 14,80 yang berarti peran PAD dalam struktur pendapatan masih tergolong kecil, yaitu 14,80 persen.

Pada tahun 2017, rasio kemandirian Kota Surakarta meningkat cukup tajam menjadi 41,33 persen. Dengan demikian peran PAD Kota Surakarta semakin tinggi dalam struktur pendapatan. Rasio ketergantungan pada tahun 2017 juga mengalami kemajuan yang

ditunjukkan oleh semakin kecilnya nilai rasio, yaitu 70,76. Untuk derajat desentralisasi pada tahun 2017 menunjukkan kondisi yang semakin baik, yang ditunjukkan dengan nilai rasio 15,99.

Tabel 4.22.
Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Semester I Tahun 2017

Daerah	Rasio Kemandirian	Rasio Ketergantungan	Derajat Desentralisasi	Rasio Efektivitas PAD	Rasio PAD-Total Belanja	Rasio Belanja Pegawai-Total Belanja	Rasio Belanja Modal-Total Belanja
Kab. Banjarnegara	14,87	87,87	2,27	144,81	10,96	44,56	24,17
Kab. Banyumas	22,55	78,92	5,17	120,18	18,65	47,28	13,81
Kab. Batang	17,20	74,29	3,53	131,96	13,45	46,89	14,34
Kab. Blora	11,06	81,73	2,21	82,28	8,78	49,42	22,28
Kab. Boyolali	17,62	81,97	4,23	116,48	14,21	51,24	18,18
Kab. Brebes	14,88	75,35	2,59	108,77	11,51	38,43	26,63
Kab. Cilacap	17,34	77,98	4,93	130,47	13,60	45,09	26,79
Kab. Demak	18,44	85,03	4,62	121,87	13,92	40,70	30,76
Kab. Grobogan	21,06	80,08	2,88	146,22	14,37	41,89	21,23
Kab. Jepara	19,84	79,53	4,59	147,20	14,95	41,72	18,40
Kab. Karanganyar	16,86	80,15	6,34	139,17	14,44	47,84	18,31
Kab. Kebumen	13,39	88,72	2,41	134,40	10,75	44,71	24,00
Kab. Kendal	18,63	76,93	4,49	130,06	13,56	48,21	16,87
Kab. Klaten	11,69	79,28	3,35	115,30	9,82	54,32	9,67
Kab. Kudus	17,85	84,61	4,49	101,57	12,99	38,52	31,56
Kab. Magelang	18,79	85,74	4,77	119,93	13,91	46,27	17,03
Kab. Pati	18,00	86,32	2,63	117,52	12,19	44,12	16,25
Kab. Pekalongan	21,06	82,48	2,28	114,64	17,21	52,42	13,18
Kab. Pemalang	17,36	84,18	2,16	129,64	14,91	61,34	13,32
Kab. Purbalingga	21,42	81,18	2,50	126,04	13,89	49,51	16,50
Kab. Purworejo	18,65	82,76	2,05	126,91	12,99	49,97	13,93
Kab. Rembang	22,47	84,94	3,09	129,51	13,50	48,42	19,92
Kab. Semarang	18,16	75,04	5,35	118,43	16,13	47,68	19,32
Kab. Sragen	18,61	85,39	3,16	135,35	14,05	50,74	15,38
Kab. Sukoharjo	27,47	78,72	9,42	137,18	19,32	53,79	17,43
Kab. Tegal	14,74	83,99	3,23	114,92	13,05	47,15	21,33
Kab. Temanggung	25,82	73,44	1,93	138,27	16,17	42,30	22,91
Kab. Wonogiri	13,90	86,60	1,71	118,51	10,25	55,98	18,97
Kab. Wonosobo	17,78	73,53	1,92	121,41	12,35	47,45	17,10
Kota Magelang	31,64	67,57	3,09	123,69	25,27	44,15	25,45
Kota Pekalongan	28,10	76,20	6,16	111,25	20,55	41,03	23,23
Kota Salatiga	34,76	76,84	5,49	138,95	22,16	45,00	29,06

Daerah	Rasio Kemandirian	Rasio Ketergantungan	Derajat Desentralisasi	Rasio Efektivitas PAD	Rasio PAD-Total Belanja	Rasio Belanja Pegawai-Total Belanja	Rasio Belanja Modal-Total Belanja
Kota Semarang	80,74	50,50	24,53	121,04	37,94	43,18	26,11
Kota Surakarta	32,77	73,85	14,80	114,20	25,32	53,45	18,30
Kota Tegal	31,37	72,62	5,10	111,09	26,74	38,43	23,12

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah.

Secara ringkas, kondisi rasio keuangan dibandingkan dengan daerah lain pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kota Surakarta pada tahun 2017 memiliki peringkat yang baik dalam rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, serta rasio PAD terhadap total belanja. Rasio PAD terhadap total belanja menunjukkan seberapa besar kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah.

Tabel 4.23.
Peringkat Rasio Keuangan Kota Surakarta Tahun 2016

Rasio Keuangan	Peringkat
Rasio Kemandirian	3
Rasio Ketergantungan	6
Derajat Desentralisasi	2
Rasio Efektivitas PAD	30
Rasio PAD-Total Belanja	3
Rasio Belanja Pegawai-Total Belanja	31
Rasio Belanja Modal-Total Belanja	21

Rasio-rasio di atas untuk Kota Surakarta pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun belum bisa diperbandingkan dengan daerah lain karena data lengkap untuk daerah lain belum tersedia semuanya.

4.5. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam kemiskinan, terdapat dua ukuran yang dipergunakan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan. Dalam hal tingkat

kedalaman kemiskinan, pada tahun 2017 Kota Surakarta memiliki nilai 1,71 (peringkat 20) dengan rata-rata selama 2010-2017 sebesar 1,68 sedangkan dalam tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,44 (peringkat 22) dengan rata-rata selama 2010-2017 sebesar 0,39. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tingkat provinsi Jawa Tengah. Selama 2010-2017 setiap tahun tingkat kedalaman kemiskinan Kota Surakarta rata-rata turun sebesar -2,23 persen dan tingkat keparahan kemiskinan rata-rata turun sebesar -2,62 persen per tahun.

Tabel 4.24.
Perbandingan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) Tahun 2017

Wilayah Jateng	P1	P2	Rata-rata 2010-2017		Rata-rata Pertumbuhan 2010-2017	
	2017	2017	P1	P2	P1	P2
PROVINSI JAWA TENGAH	2.21	0.57	2.38	0.61	-2.40	-2.49
Kabupaten Cilacap	1.98	0.42	2.44	0.61	-5.94	-8.96
Kabupaten Banyumas	3.19	0.85	3.20	0.84	-1.56	-2.15
Kabupaten Purbalingga	2.79	0.68	3.41	0.87	-5.02	-6.40
Kabupaten Banjarnegara	3.25	0.84	3.18	0.83	-0.39	-1.29
Kabupaten Kebumen	3.62	0.99	3.60	0.93	-0.23	1.05
Kabupaten Purworejo	2.25	0.54	2.43	0.60	-2.42	-2.61
Kabupaten Wonosobo	3.85	1.1	4.15	1.19	-0.40	0.13
Kabupaten Magelang	1.67	0.31	1.89	0.41	-2.89	-5.48
Kabupaten Boyolali	1.96	0.53	2.14	0.55	-2.50	-4.09
Kabupaten Klaten	2.46	0.61	2.60	0.66	-2.56	-2.91
Kabupaten Sukoharjo	0.93	0.17	1.26	0.27	-6.95	-9.43
Kabupaten Wonogiri	1.8	0.43	2.11	0.52	-7.13	-10.30
Kabupaten Karanganyar	1.85	0.43	2.04	0.48	-0.97	-2.13
Kabupaten Sragen	1.93	0.42	2.51	0.64	-5.42	-6.25
Kabupaten Grobogan	2.03	0.56	2.32	0.56	-2.82	1.06
Kabupaten Blora	1.53	0.31	2.15	0.51	-6.12	-9.22
Kabupaten Rembang	3.24	0.89	3.18	0.78	-1.10	1.00
Kabupaten Pati	1.44	0.35	1.88	0.45	-7.20	-9.05
Kabupaten Kudus	1	0.21	0.96	0.18	1.20	3.96
Kabupaten Jepara	0.98	0.22	1.07	0.22	-1.89	0.00
Kabupaten Demak	2.2	0.59	2.55	0.65	-7.34	-8.98
Kabupaten Semarang	1.1	0.25	1.34	0.32	-3.87	-3.03
Kabupaten Temanggung	1.81	0.43	1.75	0.38	0.65	3.41
Kabupaten Kendal	1.69	0.39	2.12	0.58	-9.80	-15.80
Kabupaten Batang	1.51	0.31	1.82	0.42	-5.78	-7.62
Kabupaten Pekalongan	1.73	0.36	1.92	0.41	-4.57	-5.38
Kabupaten Pemalang	3.52	1	3.06	0.77	1.42	3.24

Wilayah Jateng	P1	P2	Rata-rata 2010-2017		Rata-rata Pertumbuhan 2010-2017	
	2017	2017	P1	P2	P1	P2
Kabupaten Tegal	1.27	0.27	1.45	0.33	-4.71	-3.64
Kabupaten Brebes	3.06	0.78	3.55	0.93	-4.65	-5.63
Kota Magelang	1.3	0.32	1.37	0.31	-3.01	-2.79
Kota Surakarta	1.87	0.44	1.68	0.39	-2.23	-2.62
Kota Salatiga	0.85	0.21	0.92	0.20	-1.43	3.96
Kota Semarang	0.54	0.12	0.67	0.15	-6.89	-9.95
Kota Pekalongan	0.92	0.2	1.02	0.20	-2.65	0.74
Kota Tegal	1.42	0.38	1.34	0.33	-2.70	-2.07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Secara umum, tingkat kemiskinan Kota Surakarta selama 2010-2017 rata-rata mencapai 11,70 persen dan masuk dalam peringkat 11 dari seluruh daerah di Jawa Tengah. Dalam hal pertumbuhan tingkat kemiskinan per tahun, Kota Surakarta selama 2010-2017 memiliki rata-rata pertumbuhan -3,79 persen yang berarti setiap tahun rata-rata tingkat kemiskinan turun sebesar 3,79 persen. Angka penurunan ini tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain.

Tabel 4.25.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan 2010-2017

KAB/KOTA	RATA-RATA 2010-2017	PERINGKAT	KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PERINGKAT
Kota Semarang	5.07	1	Kota Salatiga	-6.77	1
Kota Salatiga	6.36	2	Kabupaten Demak	-4.68	2
Kabupaten Kudus	8.31	3	Kabupaten Batang	-4.28	3
Kota Pekalongan	8.54	4	Kabupaten Semarang	-4.19	4
Kabupaten Semarang	8.78	5	Kabupaten Grobogan	-4.15	5
Kabupaten Jepara	9.05	6	Kabupaten Tegal	-3.93	6
Kota Tegal	9.12	7	Kota Surakarta	-3.79	7
Kota Magelang	9.64	8	Kota Tegal	-3.78	8
Kabupaten Sukoharjo	9.76	9	Kabupaten Purbalingga	-3.76	9
Kabupaten Tegal	10.70	10	Kabupaten Kendal	-3.72	10
Kota Surakarta	11.70	11	Kabupaten Cilacap	-3.67	11
Kabupaten Batang	12.03	12	Kabupaten Pekalongan	-3.59	12
Kabupaten Temanggung	12.22	13	Kabupaten Rembang	-3.41	13
Kabupaten Kendal	12.50	14	Kabupaten Pati	-3.38	14
Kabupaten Pati	12.79	15	Kabupaten Jepara	-3.18	15
Kabupaten Boyolali	13.05	16	Kota Pekalongan	-3.17	16

KAB/KOTA	RATA-RATA 2010-2017	PERINGKAT
Kabupaten Karanganyar	13.31	17
Kabupaten Magelang	13.52	18
Kabupaten Pekalongan	13.64	19
Kabupaten Wonogiri	13.98	20
Kabupaten Blora	14.43	21
Kabupaten Grobogan	14.98	22
Kabupaten Purworejo	15.23	23
Kabupaten Cilacap	15.32	24
Kabupaten Demak	15.64	25
Kabupaten Klaten	15.66	26
Kabupaten Sragen	15.72	27
Kabupaten Banjarnegara	18.47	28
Kabupaten Banyumas	18.50	29
Kabupaten Pemalang	18.83	30
Kabupaten Rembang	20.61	31
Kabupaten Brebes	20.72	32
Kabupaten Purbalingga	20.74	33
Kabupaten Kebumen	21.31	34
Kabupaten Wonosobo	21.92	35

KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PERINGKAT
Kabupaten Sukoharjo	-3.14	17
Kabupaten Blora	-3.11	18
Kabupaten Sragen	-3.11	19
Kabupaten Klaten	-2.97	20
Kabupaten Wonogiri	-2.74	21
Kabupaten Purworejo	-2.60	22
Kabupaten Brebes	-2.60	23
Kota Magelang	-2.58	24
Kabupaten Kudus	-2.42	25
Kabupaten Banyumas	-2.39	26
Kabupaten Temanggung	-2.27	27
Kabupaten Kebumen	-2.08	28
Kabupaten Pemalang	-1.97	29
Kabupaten Boyolali	-1.94	30
Kabupaten Wonosobo	-1.85	31
Kabupaten Magelang	-1.84	32
Kabupaten Karanganyar	-1.84	33
Kabupaten Banjarnegara	-1.53	34
Kota Semarang	-1.46	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Di dalam permasalahan ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini, Kota Surakarta memiliki rata-rata nilai indeks Gini sebesar 0,30 selama 2010-2017. Angka ini meski tergolong masih dalam batas wajar, namun perlu mendapatkan perhatian mengingat angka 0,3 masuk dalam kelompok batas atas. Nilai indeks Gini yang mendekati 0,40 dianggap sudah menjadi permasalahan serius dalam distribusi pendapatan atau ketimpangan.

Nilai indeks Gini Kota Surakarta tersebut masuk dalam peringkat 32 dari 35 daerah di Jawa Tengah. Dari sisi rata-rata pertumbuhan tiap tahun, nilai indeks Gini Kota Surakarta memiliki rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,69 persen. Meski angka rata-rata pertumbuhan ini tergolong kecil secara relatif (dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah), namun secara absolute termasuk tinggi.

Tabel 4.26
Perbandingan Indeks Gini 2010-2017

KAB/KOTA	RATA-RATA 2010-2017	PERINGKAT	KAB/KOTA	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PERINGKAT
Kabupaten Pemalang	0.23	1	Kota Semarang	-0.99	1
Kabupaten Pekalongan	0.24	2	Kabupaten Sukoharjo	0.81	2
Kabupaten Pati	0.24	3	Kabupaten Sragen	1.35	3
Kabupaten Rembang	0.25	4	Kabupaten Banyumas	1.39	4
Kabupaten Jepara	0.25	5	Kota Magelang	1.45	5
Kabupaten Batang	0.25	6	Kabupaten Batang	1.56	6
Kabupaten Kebumen	0.26	7	Kota Surakarta	1.69	7
Kabupaten Kudus	0.26	8	Kabupaten Purbalingga	1.79	8
Kabupaten Brebes	0.26	9	Kabupaten Boyolali	1.79	9
Kabupaten Demak	0.26	10	Kabupaten Kebumen	1.94	10
Kota Tegal	0.26	11	Kabupaten Brebes	1.94	11
Kabupaten Grobogan	0.26	12	Kabupaten Pemalang	2.27	12
Kabupaten Tegal	0.27	13	Kota Salatiga	2.27	13
Kabupaten Purbalingga	0.27	14	Kabupaten Temanggung	2.30	14
Kabupaten Semarang	0.27	15	Kota Tegal	2.31	15
Kabupaten Cilacap	0.27	16	Kabupaten Pekalongan	2.51	16
Kabupaten Banjarnegara	0.27	17	Kota Pekalongan	2.64	17
Kabupaten Magelang	0.27	18	Kabupaten Tegal	2.74	18
Kota Pekalongan	0.27	19	Kabupaten Kendal	2.94	19
Kabupaten Boyolali	0.27	20	Kabupaten Pati	2.96	20
Kabupaten Wonogiri	0.27	21	Kabupaten Semarang	2.96	21
Kabupaten Sukoharjo	0.28	22	Kabupaten Karanganyar	3.03	22
Kabupaten Kendal	0.28	23	Kabupaten Rembang	3.06	23
Kabupaten Klaten	0.28	24	Kabupaten Banjarnegara	3.26	24
Kabupaten Wonosobo	0.28	25	Kabupaten Wonogiri	3.39	25
Kabupaten Purworejo	0.28	26	Kabupaten Wonosobo	3.46	26
Kabupaten Sragen	0.28	27	Kabupaten Demak	3.54	27
Kabupaten Blora	0.29	28	Kabupaten Cilacap	3.60	28
Kabupaten Banyumas	0.30	29	Kabupaten Grobogan	3.60	29
Kabupaten Karanganyar	0.30	30	Kabupaten Klaten	3.66	30
Kota Magelang	0.30	31	Kabupaten Jepara	3.69	31
Kota Surakarta	0.30	32	Kabupaten Magelang	3.96	32
Kabupaten Temanggung	0.31	33	Kabupaten Kudus	4.19	33
Kota Semarang	0.31	34	Kabupaten Purworejo	4.37	34
Kota Salatiga	0.31	35	Kabupaten Blora	4.55	35

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah.

4.6. Proyeksi Makroekonomi

Banyak metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam proyeksi makroekonomi, seperti: 1) pendekatan ekonometrika, yaitu penyusunan model ekonometrika untuk makroekonomi, 2) pendekatan statistika, baik yang linier maupun non linier, misalnya *least square*, *moving average*, *growth rate*, tren eksponensial, tren kuadratik, dan sebagainya. Proyeksi menggunakan pendekatan ekonometrika telah dipergunakan secara luas dan memiliki

kelebihan karena menggunakan banyak variabel yang disusun ke dalam suatu model, seperti: $Y=f(X_1, X_2, X_3, \dots X_n)$.

Proyeksi makroekonomi pada umumnya berkaitan dengan agregat atau output makroekonomi, seperti proyeksi PDRB, proyeksi penduduk, proyeksi pendapatan, proyeksi investasi, dan sebagainya. Proyeksi seperti ini sering dipergunakan untuk proyeksi hingga 5 tahun ke depan. Sementara itu proyeksi tentang pertumbuhan lazimnya dipergunakan untuk satu tahun ke depan, misalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi (bukan proyeksi PDRB), proyeksi pertumbuhan penduduk (bukan proyeksi jumlah penduduk). Meski demikian, karena alasan dan pertimbangan tertentu proyeksi pertumbuhan dapat dilakukan.

Dalam proyeksi beberapa indikator makroekonomi Kota Surakarta ini, dipergunakan pendekatan statistika namun juga menggunakan adjustment, mengingat: 1) keterbatasan data, 2) fluktuasi indikator yang tidak memiliki pola. Beberapa asumsi yang dijadikan sebagai dasar proyeksi adalah: (1) pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5%, (2) pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berkisar 5,00 persen - 5,50 persen, (3) inflasi Kota Surakarta berkisar 3,00 s.d. 3,15 persen, (4) pertumbuhan jumlah penduduk di bawah 3,00 persen, (5) rata-rata pertumbuhan tingkat kemiskinan berkurang sebesar rata-rata pertumbuhannya (3,8 persen per tahun).

Dengan menggunakan asumsi-asumsi di atas, proyeksi beberapa indikator makroekonomi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

A. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5,62-6,02	5,70-6,10	5,77-6,17	5,84-6,24	5,92-6,32	6,20-6,60	6,50-6,90	6,80-7,20

Catatan:

Selisih skenario optimis dengan pesimis 0.004 (0,4 persen). Angka ini merupakan penyesuaian yang didasarkan pada informasi: a). Rata-rata selisih pertumbuhan serta selisih rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jateng dengan Kota Surakarta selama 2010-2016 adalah 0,0042 (0,42 persen); b) Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta Tahun 2017 adalah 5,33 persen dan mulai 2018-2021 diasumsikan setiap tahun terdapat kenaikan pertumbuhan minimal 0,0005 = 0,05 persen; c) mulai 2022-2025, tiap tahun diasumsikan pertumbuhan ekonomi bertambah 0,001 = 0,1 persen (dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan RPJMD).

B. PROYEKSI INDEKS GINI

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,33-0,36	0,33-0,36	0,33-0,35	0,32-0,35	0,32-0,35	0,32-0,34	0,32-0,34	0,31-0,34

Catatan:

Proyeksi Indeks Gini menggunakan pendekatan *least square*, yang disesuaikan dengan koefisien variasi (yaitu rasio deviasi standar terhadap rata-rata), berdasarkan data Indeks Gini Kota Surakarta 2000-2015. Koefisien variasi dimaksudkan untuk “menangkap” fluktuasi data sepanjang periode pengamatan.

C. PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
563.720	565.174	566.632	568.094	569.560	571.029	572.503	573.980

Catatan:

Proyeksi jumlah penduduk menggunakan pendekatan rata-rata pertumbuhan selama 2003-2016, yang besarnya mencapai 0,00258 atau 0,258 persen. Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan

ketersediaan data series penduduk yang lengkap, serta publikasi jumlah penduduk tahun 2017 menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

D. PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN (%)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10,25	9,86	9,48	9,12	8,77	8,44	8,12	7,81

Catatan:

Proyeksi ini menggunakan pendekatan *growth rate* tingkat kemiskinan Kota Surakarta selama 2010-2017, yang menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 0,038 atau 3,8 persen per tahun. Penurunan jumlah kemiskinan dapat dibuat dengan menggunakan peningkatan jumlah belanja untuk program pengurangan kemiskinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, perekonomian Kota Surakarta telah mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator makroekonomi di berbagai bidang. Hasil evaluasi kinerja perekonomian Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta selama 2011-2016 memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi yaitu sekitar 5,70 persen dan angka ini masuk dalam kelompok 10 besar rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dari seluruh daerah di Jawa Tengah. PDRB produksi menunjukkan perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh **sektor konstruksi, sektor perdagangan, serta sektor informasi dan komunikasi**. PDRB pengeluaran menunjukkan **konsumsi rumah tangga** memiliki proporsi yang cukup tinggi dalam perekonomian Kota Surakarta, yaitu sekitar 50 persen, sedangkan pengeluaran untuk investasi sekitar 65 persen. Jumlah yang lebih dari 100 persen ini disebabkan karena **ekspor neto yang negatif**, sehingga posisi neraca perdagangan Kota Surakarta selalu defisit. Sedangkan ditinjau dari aspek inflasi, Kota Surakarta menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki laju inflasi **sangat rendah** dibandingkan daerah lain.
- b. Evaluasi terhadap indikator pembangunan manusia (IPM) ditunjukkan oleh keberhasilan Kota Surakarta menempati peringkat 2 dari 35 daerah di seluruh Jawa Tengah dengan skor 79,00. Jadi, nilai IPM Kota Surakarta tergolong **tinggi**. Komponen penyusun IPM yaitu angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran perkapita (PPK). Pada ukuran angka harapan hidup (AHH), Kota Surakarta menempati peringkat ke 3 dari 35 daerah seluruh Jawa Tengah

dengan skor 76,95. Dengan demikian aspek kesehatan dasar di Kota Surakarta sudah terlaksana dengan sangat baik. Dari sisi harapan lama sekolah (HLS), Kota Surakarta juga menempati peringkat 3 dari 35 daerah di seluruh Jawa Tengah dengan skor 13,74. Dari ukuran rata-rata lama sekolah (RLS), Kota Surakarta menempati peringkat ke 2 dari 35 daerah di seluruh Jawa Tengah dengan nilai 10,21 tahun. Dari komponen pengeluaran perkapita, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Surakarta selama 2010-2016 mencapai 12,98 juta rupiah per orang per tahun. Angka ini tergolong **tinggi**, sehingga menempatkan Kota Surakarta di peringkat kedua dari 35 daerah di Jawa Tengah.

- c. Evaluasi kebijakan terkait dengan elastisitas pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sendiri **tergolong kecil** yaitu sekitar 10 persen. Hal ini merupakan indikasi bahwa peran masyarakat dalam pembangunan Kota Surakarta cukup besar, beberapa kegiatan ekonomi masyarakat digerakkan oleh mereka sendiri sehingga peran pemerintah dalam perekonomian Kota Surakarta adalah sebagai penyeimbang atau pelengkap. Pemerintah berperan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui kebijakan, sehingga diharapkan pengeluaran pemerintah lebih fokus untuk sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pendukung. Pengaruh terhadap aspek kemiskinan juga ditunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang menurun. Tingkat kemiskinan Kota Surakarta ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Namun dalam hal ketimpangan distribusi pendapatan, Kota Surakarta memiliki indeks Gini yang cukup tinggi dan tren dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.
- d. Kemampuan keuangan daerah dalam kurun waktu 2015-2017 menunjukkan **perbaikan**, total realisasi pendapatan dalam APBD mengalami kenaikan sebesar 15,01 persen dari 1,568 triliun rupiah menjadi 1,803 triliun rupiah, atau naik sebesar 5,93 persen dibandingkan tahun 2016. Pendapatan daerah terdiri dari 3 komponen utama yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen utama tersebut, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki kenaikan tertinggi selama 2016-2017 yaitu 31,43 persen atau dari 173 milyar rupiah di tahun 2016 menjadi 228 milyar rupiah di tahun 2017. **Komponen dana perimbangan menunjukkan penurunan** yang selama 2016-2017 yaitu -5,03 persen.

Dengan demikian secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja makroekonomi Kota Surakarta menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini mampu menuju pada sasaran akhir berupa kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator-indikator yang ada.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

1. Pemerintah Kota Surakarta perlu melaksanakan pemetaan secara lebih mendalam dan komprehensif atas komoditi/bidang usaha potensial yang memiliki kriteria: (a) mampu menyerap banyak tenaga kerja, (b) memiliki peluang menarik investor, (c) memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi, (d) mendukung potensi ekonomi lokal.
2. Pemerintah Kota Surakarta perlu merintis dan mendorong terwujudnya konsep *smart economy* sebagai dasar terbentuknya *smart city* untuk mendorong pengembangan perdagangan, industri, dan jasa.
3. Pemerintah Kota Surakarta melalui OPD terkait perlu merumuskan kebijakan, strategi, dan implementasi secara terintegrasi yang mendukung *easy of doing business* dalam rangka untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui dinamika perdagangan, industri, dan jasa, yang akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, serta mendorong akselerasi menjadi *smart economy* dan *smart city*.
4. Evaluasi atas sinkronisasi serta koordinasi kebijakan dan strategi antar OPD diperlukan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang ditandai dengan: (a) semakin kecilnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan, (b) terkendalinya laju inflasi, (c) semakin

berkembangnya UMKM, (d) semakin meningkatnya neraca perdagangan (meningkatnya ekspor dan menurunnya impor).

5. Upaya untuk mendorong berkembangnya pelaku usaha baru yang memanfaatkan potensi ekonomi lokal serta mendukung berkembangnya ekonomi kreatif perlu dilakukan melalui kebijakan dan strategi yang implementatif dengan ukuran atau parameter yang jelas dan rasional.
6. Pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perlu diwujudkan secara riil, rutin, dan berkesinambungan baik di bawah koordinasi OPD terkait maupun melalui suatu badan dalam rangka mendukung proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang semakin berkualitas dan terukur atas program pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (2017). www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2017). www.jatengprov.bps.go.id
- BPS Kota Surakarta (2017). Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 2010-2016.
- BPS Kota Surakarta (2017). Kota Surakarta dalam Angka
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta (2017). *Data Kependudukan Kota Surakarta Semester 1 Tahun 2017*.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2017). *Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017). *Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Pemerintah Kota Surakarta (2018). *Realisasi APBD 2017 Kota Surakarta*.
- Cahyadin, Malik. 2010. Modul Analisis Ekonomi Pembangunan. Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UNS. Hal 4-10. Surakarta.
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. (1995). *Makro-Ekonomi*. Edisi keempat belas, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soepono, Prasetyo. 1993. Analisis *Shift-Share*: Perkembangan dan Penerapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vo. VIII No. 1 Hal. 43 – 54. Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel 4.1.
Proporsi PDRB Kota Surakarta 2010-2016 Berdasarkan Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Proporsi 2010-2016	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi 2010-2016 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,5013	0,5098	0,4945	0,4888	0,4730	0,4566	0,4387	0,4804	-2,20
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,4989	0,5076	0,4924	0,4867	0,4711	0,4548	0,4369	0,4783	-2,19
a. Tanaman Pangan	0,0200	0,0180	0,0186	0,0178	0,0114	0,0110	0,0106	0,0153	-10,10
b. Tanaman Hortikultura	0,0584	0,0674	0,0541	0,0504	0,0474	0,0460	0,0437	0,0525	-4,72
c. Perkebunan	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0006	0,0007	-3,44
f. Peternakan	0,4102	0,4119	0,4086	0,4068	0,4009	0,3869	0,3722	0,3996	-1,61
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,0095	0,0096	0,0104	0,0111	0,0107	0,0102	0,0098	0,0102	0,41
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-5,76
3. Perikanan	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0019	0,0018	0,0017	0,0020	-4,82
Pertambangan dan Penggalian	0,0028	0,0025	0,0023	0,0022	0,0020	0,0019	0,0018	0,0022	-7,23
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
3.. Pertambangan Bijih Logam	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,0028	0,0025	0,0023	0,0022	0,0020	0,0019	0,0018	0,0022	-7,23
Industri Pengolahan	7,6203	7,6443	7,7722	7,9745	8,0940	7,9568	7,8351	7,8425	0,46
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
2. Industri Makanan dan Minuman	2,1005	2,2324	2,2381	2,3416	2,3894	2,4812	2,5130	2,3280	3,03
3. Pengolahan Tembakau	1,6114	1,4613	1,4526	1,3731	1,5543	1,4749	1,4049	1,4761	-2,26
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,9050	1,8984	2,0782	2,2513	2,1923	2,0818	2,0259	2,0618	1,03
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,1596	0,1635	0,1700	0,1784	0,1882	0,1896	0,1875	0,1767	2,72
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bar	0,2220	0,2116	0,1950	0,2105	0,2086	0,2022	0,2034	0,2076	-1,44
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,6219	0,6200	0,5457	0,5102	0,4811	0,4958	0,4879	0,5375	-3,96
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,0807	0,0952	0,1137	0,1213	0,1229	0,1193	0,1152	0,1097	6,10
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,3727	0,3807	0,4057	0,3954	0,3850	0,3645	0,3631	0,3810	-0,44
10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,0171	0,0176	0,0191	0,0186	0,0176	0,0168	0,0162	0,0176	-0,85
11. Industri Logam Dasar	0,0028	0,0030	0,0029	0,0029	0,0030	0,0028	0,0027	0,0029	-0,71
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,1723	0,1796	0,1891	0,2165	0,2079	0,1936	0,1832	0,1917	1,04
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,0767	0,0815	0,0843	0,0821	0,0794	0,0780	0,0781	0,0800	0,30
14. Industri Alat Angkutan	0,0051	0,0050	0,0051	0,0055	0,0054	0,0053	0,0053	0,0053	0,65
15. Industri Furnitur	0,0523	0,0622	0,0460	0,0545	0,0536	0,0544	0,0534	0,0538	0,32

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Proporsi 2010-2016	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi 2010-2016 (%)
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,2202	0,2322	0,2269	0,2125	0,2053	0,1966	0,1951	0,2127	-1,99
Pengadaan Listrik dan Gas	0,2192	0,2228	0,2375	0,2412	0,2353	0,2288	0,2308	0,2308	0,86
1. Ketenagalistrikan	0,2165	0,2200	0,2347	0,2382	0,2323	0,2257	0,2280	0,2279	0,87
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,0027	0,0028	0,0028	0,0030	0,0030	0,0030	0,0028	0,0029	0,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,2250	0,2164	0,1998	0,1849	0,1801	0,1738	0,1690	0,1927	-4,66
Konstruksi	28,2269	27,0303	26,9964	26,4032	25,9941	25,9736	26,2479	26,6961	-1,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,8168	24,7191	23,8950	24,1631	23,9324	23,6295	23,4570	23,9447	-0,25
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	3,1889	3,0535	3,0267	3,1018	3,0739	3,0639	3,0299	3,0769	-0,85
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	20,6279	21,6656	20,8683	21,0613	20,8586	20,5656	20,4270	20,8678	-0,16
Transportasi dan Pergudangan	2,6371	2,5905	2,6116	2,7118	2,7918	2,8696	2,8694	2,7260	1,42
1. Angkutan Rel	0,0644	0,0586	0,0543	0,0546	0,0671	0,0756	0,0781	0,0647	3,26
2. Angkutan Darat	2,4968	2,4556	2,4792	2,5776	2,6430	2,7078	2,7059	2,5809	1,35
3. Angkutan Laut	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
5. Angkutan Udara	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,0759	0,0763	0,0781	0,0795	0,0817	0,0862	0,0855	0,0805	1,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,8670	4,9463	5,0511	5,0264	5,1062	5,1419	5,1308	5,0385	0,88
1. Penyediaan Akomodasi	2,0407	2,1406	2,2949	2,3287	2,3672	2,3544	2,3259	2,2646	2,20
2. Penyediaan Makan Minum	2,8264	2,8057	2,7562	2,6977	2,7390	2,7875	2,8049	2,7739	-0,13
Informasi dan Komunikasi	11,3619	11,5838	12,2677	12,5003	12,9346	13,0848	13,1792	12,4160	2,50
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,6472	3,5814	3,4933	3,4025	3,3637	3,3945	3,4919	3,4821	-0,72
1. Jasa Perantara Keuangan	2,6953	2,5748	2,4459	2,3247	2,2331	2,1825	2,2221	2,3826	-3,17
2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,1854	0,1866	0,2052	0,2214	0,2462	0,2634	0,2733	0,2259	6,68
3. Jasa Keuangan Lainnya	0,7662	0,8195	0,8417	0,8559	0,8839	0,9481	0,9961	0,8730	4,47
4. Jasa Penunjang Keuangan	0,0004	0,0004	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	3,40
Real Estate	4,2269	4,2535	4,3136	4,2709	4,3170	4,3898	4,4349	4,3152	0,80
Jasa Perusahaan	0,6352	0,6636	0,6737	0,6934	0,7038	0,7294	0,7503	0,6928	2,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6,4628	6,2435	6,0115	5,8773	5,6511	5,7057	5,5445	5,9280	-2,52
Jasa Pendidikan	3,6599	3,8881	4,0714	4,1366	4,2428	4,2995	4,2360	4,0763	2,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,8534	0,8986	0,9149	0,9313	0,9960	1,0037	1,0199	0,9454	3,02
Jasa lainnya	1,0362	1,0055	0,9938	0,9917	0,9820	0,9601	0,9629	0,9903	-1,21
PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010	100,0000								

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Lampiran 2

Tabel 4.2.
Proporsi PDRB Kota Surakarta 2010-2016 Berdasarkan Pengeluaran
Atas Dasar Harga Konstan 2010

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Proporsi 2010-2016	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi 2010-2016 (%)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,66	50,76	50,73	50,13	49,84	49,47	48,75	50,04	-0,64
1.a. Makanan, Minuman Selain Restoran	13,29	12,68	12,12	11,55	11,09	10,75	10,62	11,73	-3,67
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,94	1,91	1,89	1,85	1,83	1,83	1,85	1,87	-0,79
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan	8,97	8,98	8,98	8,87	8,93	8,86	8,65	8,89	-0,59
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,87	6,88	6,89	6,83	6,72	6,70	6,70	6,80	-0,42
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi	14,93	15,60	16,08	16,30	16,48	16,51	16,19	16,01	1,35
1.f. Hotel dan Restoran	3,65	3,55	3,55	3,48	3,54	3,57	3,52	3,55	-0,59
1.g. Lainnya	1,00	1,15	1,21	1,25	1,25	1,25	1,21	1,18	3,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,56	0,55	0,55	0,56	0,57	0,53	0,53	0,55	-1,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,56	11,21	10,94	10,90	10,62	10,43	9,61	10,75	-3,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	67,36	65,57	64,87	64,11	64,45	64,69	64,68	65,10	-0,67
4.a. Bangunan	64,93	63,05	62,32	61,54	62,05	62,44	62,56	62,69	-0,62
4.b. Non-Bangunan	2,43	2,52	2,55	2,57	2,40	2,26	2,12	2,40	-2,23
5. Perubahan Inventori	0,06	4,48	4,59	2,58	2,13	0,38	0,34	2,08	33,01
6. Ekspor	30,20	32,58	31,69	28,32	27,61	28,21	27,73	29,47	-1,42
7. Impor	60,40	65,15	63,38	56,60	55,23	53,71	51,62	58,01	-2,59
Net Ekspor	-30,20	-32,58	-31,69	-28,28	-27,62	-25,50	-23,89	-28,53	-3,83
PDRB PENGELUARAN	100,00								

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Lampiran 3

Tabel 4.3.
Rata-rata Pertumbuhan per tahun Sektor/Subsektor 2010-2016 di atas 5%

No	Sektor/Subsektor	Rata-rata Pertumbuhan Output
1	Asuransi dan Dana Pensiun	12,78
2	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	12,17
3	Jasa Keuangan Lainnya	10,44
4	Jasa Penunjang Keuangan	9,31
5	Angkutan Rel	9,16
6	Industri Makanan dan Minuman	8,92
7	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,90
8	Jasa Perusahaan	8,69
9	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	8,59
10	Informasi dan Komunikasi	8,36
11	Jasa Pendidikan	8,32
12	Penyediaan Akomodasi	8,05
13	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	7,82
14	Transportasi dan Pergudangan	7,21
15	Angkutan Darat	7,14
16	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	6,81
17	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	6,80
18	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,65
19	Ketenagalistrikan	6,63
20	Pengadaan Listrik dan Gas	6,63
21	Real Estate	6,56
22	Industri Alat Angkutan	6,40
23	Pengadaan Gas dan Produksi Es	6,21
24	Industri Pengolahan	6,21
25	Jasa Pertanian dan Perburuan	6,14
26	Industri Furnitur	6,05
27	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	6,03
28	Penyediaan Makan Minum	5,58
29	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,54
30	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	5,45
31	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	5,25

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Lampiran 4

Tabel 4.4.
Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Sektor Ekonomi 2011-2017
Atas Dasar Harga Konstan 2010

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,24	2,40	5,03	1,87	1,80	1,17	3,84	3,39
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	8,28	2,41	5,03	1,89	1,80	1,17	3,84	3,40
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,76	-4,29	1,84	-2,20	-1,19	-0,94	0,19	-0,38
3. Perikanan	-0,19	-0,36	6,24	-3,21	1,10	0,38	3,48	0,62
Pertambangan dan Penggalian	-5,32	-0,42	-0,41	-2,30	-2,62	-0,44	-0,39	-1,93
Industri Pengolahan	6,76	7,35	9,02	6,85	3,66	3,71	4,20	6,21
Pengadaan Listrik dan Gas	8,17	12,55	7,90	2,71	2,51	6,24	4,27	6,63
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,36	-2,54	-1,67	2,55	1,77	2,40	5,68	0,79
Konstruksi	1,91	5,45	3,92	3,65	5,36	6,43	4,96	4,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	10,45	2,06	7,44	4,27	4,11	4,55	5,49	5,45
Transportasi dan Pergudangan	4,54	6,44	10,32	8,38	8,38	5,31	5,70	7,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	7,82	5,73	6,95	6,18	5,09	4,41	6,65
Informasi dan Komunikasi	8,50	11,81	8,27	8,94	6,67	6,08	8,95	8,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,50	2,98	3,49	4,08	6,41	8,34	4,26	4,95
Real Estate	7,09	7,07	5,20	6,41	7,22	6,40	5,16	6,56
Jasa Perusahaan	11,19	7,18	9,36	6,86	9,28	8,34	3,97	8,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,81	1,66	3,88	1,23	6,46	2,34	1,24	3,05
Jasa Pendidikan	13,06	10,56	7,95	7,98	6,85	3,76	4,52	8,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,05	7,49	8,16	12,59	6,26	7,02	6,77	8,90
Jasa lainnya	3,27	4,35	6,03	4,25	3,09	5,63	6,86	4,43
PDRB	6,42	5,58	6,25	5,28	5,44	5,32	5,33	5,71

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Lampiran 5

Tabel 4.5.
Nilai LQ Statis dan LQ Dinamis 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010 s.d. 2016	LQ Dinamis
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03138	0,03236	0,03209	0,03264	0,03357	0,03236	0,03205	0,03273	0,03240	3,83446
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,03480	0,03591	0,03561	0,03631	0,03742	0,03592	0,03556		0,03104	2,29444
a. Tanaman Pangan	0,00319	0,00315	0,00320	0,00320	0,00239	0,00222	0,00221		0,00243	151,84163
b. Tanaman Hortikultura	0,02440	0,02749	0,02202	0,02157	0,02053	0,02049	0,02004		0,01788	0,00179
c. Perkebunan	0,00174	0,00135	0,00117	0,00112	0,00107	0,00105	0,00107		0,00085	0,00030
f. Peternakan	0,16461	0,16439	0,16340	0,16199	0,15918	0,15439	0,14849		0,13491	0,16496
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,03470	0,03504	0,03505	0,03569	0,03567	0,03439	0,03420		0,02996	0,81475
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,00006	0,00006	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005		0,00005	55,95004
3. Perikanan	0,00234	0,00222	0,00209	0,00205	0,00196	0,00192	0,00183		0,00175	0,00051
Pertambangan dan Penggalian	0,00130	0,00125	0,00118	0,00109	0,00100	0,00095	0,00079	0,00074	0,00101	0,00000
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-	-		-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,00154	0,00139	0,00131	0,00122	0,00111	0,00106	0,00102		0,00104	0,00001
Industri Pengolahan	0,22073	0,22166	0,22247	0,22752	0,22803	0,22558	0,22466	0,22439	0,22457	1,29140
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	0,21529	0,21538	0,21611	0,21870	0,21376	0,21388	0,21472		0,18149	0,90007
3. Pengolahan Tembakau	0,20298	0,19916	0,18782	0,18665	0,20559	0,20223	0,20097		0,17011	0,99823
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,72335	0,72506	0,72287	0,72180	0,70435	0,71205	0,71438		0,60835	0,83132
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,58146	0,58803	0,60146	0,60347	0,58953	0,59020	0,58308		0,49805	0,96699
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bar	0,12121	0,12119	0,11744	0,12039	0,11897	0,11935	0,11624		0,10063	0,49955
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	1,68275	1,71270	1,65071	1,61126	1,54939	1,61392	1,62156		1,40779	0,42683
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,05002	0,05384	0,05662	0,05838	0,05833	0,05733	0,05675		0,04769	2,93093
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,79442	0,80566	0,82470	0,81038	0,80042	0,83246	0,82992		0,69604	2,48621
10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,02584	0,02583	0,02636	0,02530	0,02483	0,02466	0,02398		0,02150	0,30130
11. Industri Logam Dasar	0,00877	0,00869	0,00838	0,00799	0,00778	0,00769	0,00783		0,00695	0,17288
12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang	0,34187	0,35105	0,35340	0,36703	0,35618	0,35958	0,39034		0,31294	9,58764

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010 s.d. 2016	LQ Dinamis
Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik										
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,63245	0,65858	0,67602	0,68794	0,68414	0,68423	0,67702		0,57605	3,38765
14. Industri Alat Angkutan	0,02225	0,02289	0,02238	0,02162	0,02123	0,02116	0,02079		0,01827	0,38791
15. Industri Furnitur	0,14405	0,15838	0,13251	0,14745	0,14441	0,14406	0,14411		0,12414	1,03398
16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,55765	1,63723	1,64956	1,61303	1,59421	1,59170	1,55109		1,37603	1,12174
Pengadaan Listrik dan Gas	2,14670	2,14060	2,18585	2,15415	2,07747	2,07941	2,05300	2,09161	2,11172	0,65636
1. Ketenagalistrikan	2,17711	2,17119	2,21692	2,18475	2,10601	2,10938	2,07793		1,82405	0,52052
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	1,01322	1,01695	1,01393	1,02295	1,01531	1,01098	1,03475		0,86314	1,42604
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	2,58112	2,55623	2,52095	2,44669	2,42539	2,42911	2,43364	2,41313	2,47181	0,13957
Konstruksi	2,73065	2,69336	2,66494	2,61155	2,59310	2,57791	2,56627	2,52104	2,61155	0,25149
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,61905	1,63486	1,63466	1,65917	1,65081	1,65341	1,64415	1,62393	1,64018	1,06658
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	1,05164	1,03838	1,02843	1,02912	1,02831	1,03176	1,03182		0,87894	0,77503
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,76637	1,77888	1,78748	1,82360	1,81250	1,81647	1,80284		1,53217	1,51484
Transportasi dan Pergudangan	0,88152	0,87084	0,86727	0,86578	0,85877	0,86360	0,85241	0,86199	0,86442	0,68995
1. Angkutan Rel	1,55792	1,55839	1,66644	1,63324	1,55053	1,57412	1,55006		1,28082	0,87182
2. Angkutan Darat	0,99171	0,98254	0,98194	0,98487	0,97815	0,97423	0,96098		0,82592	0,64285
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-	-	-	-		-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-	-		-	-
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,85597	0,86099	0,86261	0,85103	0,82945	0,82193	0,82064		0,70309	0,56990
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,61580	1,63791	1,67310	1,67448	1,66415	1,65509	1,63414	1,59967	1,64339	0,83009
1. Penyediaan Akomodasi	5,23697	5,22118	5,25920	5,10171	5,07809	5,08355	5,03327		4,33942	0,58943
2. Penyediaan Makan Minum	1,07774	1,07502	1,06720	1,05988	1,05259	1,05445	1,04752		0,89691	0,66001
Informasi dan Komunikasi	3,39992	3,37894	3,43504	3,40667	3,28391	3,19881	3,13190	3,01043	3,25213	0,23668
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,31890	1,30957	1,29919	1,28029	1,27969	1,26090	1,24515	1,24222	1,27594	0,36500
1. Jasa Perantara Keuangan	1,18627	1,16535	1,14166	1,11129	1,09841	1,06340	1,05007		0,94836	0,06205
2. Asuransi dan Dana Pensiun	3,48383	3,47100	3,47934	3,47459	3,63959	3,63284	3,56578		2,91748	1,05610
3. Jasa Keuangan Lainnya	1,74143	1,73847	1,72744	1,70553	1,67501	1,67179	1,62881		1,40195	0,47470
4. Jasa Penunjang Keuangan	3,50895	3,51932	3,53832	3,49727	3,53987	3,56611	3,48195		2,93039	0,84451
Real Estate	2,46886	2,46609	2,49880	2,41454	2,39703	2,38939	2,37968	2,34844	2,41375	0,46817
Jasa Perusahaan	2,22049	2,23440	2,23149	2,15311	2,13082	2,14668	2,10158	2,00847	2,14050	0,28390

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010 s.d. 2016	LQ Dinamis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	2,03786	2,02115	2,03989	2,04217	2,05113	2,07401	2,07274	2,04455	2,04766	1,48663
Jasa Pendidikan	1,39490	1,31785	1,23664	1,20569	1,19034	1,18291	1,13991	1,11122	1,20424	0,07743
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29850	1,31192	1,27533	1,27386	1,28768	1,28379	1,25019	1,22828	1,27260	0,47556
Jasa lainnya	0,66412	0,66084	0,68326	0,65606	0,63031	0,62972	0,61218	0,59982	0,63834	0,25590

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Lampiran 6

Tabel 4.6.
Shift-Share Klasik 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010

LAPANGAN USAHA		Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Mij)	Differential Shift (Cij)	Shift Share (Dij)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		46.769,42	(26.715,64)	8.810,40	28.864,18
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	38.870,71	(20.891,29)	5.824,25	23.803,67
	a, Tanaman Pangan	1.556,69	(1.394,84)	(1.290,13)	(1.128,28)
	b, Tanaman Hortikultura	4.552,84	(1.526,56)	(2.473,71)	552,58
	c, Tanaman Perkebunan	60,52	71,80	(110,44)	21,88
	d, Peternakan	31.959,17	714,19	(9.194,54)	23.478,81
	e, Jasa Pertanian dan Perburuan	741,49	110,63	26,58	878,70
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,75	(3,06)	0,14	(0,17)
3	Perikanan	182,35	(33,47)	(129,86)	19,02
Pertambangan dan Penggalian		260,32	55,08	(383,70)	(68,30)
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-
3	Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	217,38	(24,54)	(259,06)	(66,22)
Industri Pengolahan		710.954,07	1.269,93	98.133,50	810.357,50
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	163.646,56	122.670,11	15.789,06	302.105,72
3	Industri Pengolahan Tembakau	125.541,43	(56.308,34)	5.797,48	75.030,57
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	148.414,46	42.824,79	6.857,45	198.096,70
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	12.435,64	8.013,74	1.476,35	21.925,74
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	17.295,58	(2.882,59)	(1.108,76)	13.304,23
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	48.455,11	(33.826,94)	(1.942,77)	12.685,40
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	6.288,64	6.084,58	4.808,59	17.181,81
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	29.040,78	(7.372,93)	7.106,80	28.774,65
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1.332,83	118,11	(254,31)	1.196,64
11	Industri Logam Dasar	217,21	60,01	(75,27)	201,95
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	13.420,46	(3.442,11)	7.951,55	17.929,90
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	5.977,99	(1.095,18)	2.056,63	6.939,45
14	Industri Alat Angkutan	400,54	169,49	(72,22)	497,81
15	Industri Furnitur	4.078,11	288,13	383,03	4.749,27
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	17.152,14	(7.075,24)	1.135,96	11.212,86
Pengadaan Listrik dan Gas		20.450,96	4.705,39	(108,60)	25.047,75
1	Ketenagalistrikan	16.867,47	6.549,39	(1.574,73)	21.842,13
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	210,55	5,75	36,55	252,85

LAPANGAN USAHA		Regional Share (Nij)	Proportional Shift (Mij)	Differential Shift (Cij)	Shift Share (Dij)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		20.990,41	(13.434,94)	(2.340,51)	5.214,96
Konstruksi		2.633.491,58	32.291,45	(470.036,79)	2.195.746,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		2.222.038,58	(121.365,04)	201.163,47	2.301.837,00
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	248.443,75	(29.471,50)	4.356,36	223.328,62
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.607.117,29	(179.682,76)	265.080,55	1.692.515,08
Transportasi dan Pergudangan		246.037,36	94.779,75	1.894,82	342.711,93
1	Angkutan Rel	5.017,60	4.112,54	435,17	9.565,31
2	Angkutan Darat	194.524,03	86.492,10	(6.216,44)	274.799,69
3	Angkutan Laut	-	-	-	-
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-	-
5	Angkutan Udara	-	-	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	5.917,14	3.865,02	(473,45)	9.308,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		454.080,06	83.249,56	23.049,65	560.379,27
1	Penyediaan Akomodasi	158.987,87	111.011,90	(11.126,32)	258.873,45
2	Penyediaan Makan Minum	220.201,44	17.399,37	(3.876,55)	233.724,25
Informasi dan Komunikasi		1.060.028,64	1.242.465,63	(439.099,10)	1.863.395,17
Jasa Keuangan dan Asuransi		340.275,65	7.011,36	(39.322,73)	307.964,27
1	Jasa Perantara Keuangan	209.987,16	(54.128,68)	(68.648,84)	87.209,63
2	Asuransi dan Dana Pensiun	14.440,97	23.885,51	3.766,34	42.092,83
3	Jasa Keuangan Lainnya	59.692,18	87.429,43	(13.122,95)	133.998,66
4	Jasa Penunjang Keuangan	34,18	29,72	2,57	66,47
Real Estate		394.358,32	131.832,21	(36.114,13)	490.076,40
Jasa Perusahaan		59.261,80	56.538,86	(18.422,53)	97.378,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		602.965,39	(354.472,70)	46.075,53	294.568,21
Jasa Pendidikan		341.459,90	497.893,77	(298.394,54)	540.959,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		79.622,82	73.789,34	(10.307,85)	143.104,31
Jasa lainnya		96.671,99	14.015,13	(24.794,08)	85.893,04
PDRB		9.329.717,25	1.723.909,14	(960.197,22)	10.093.429,18

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Lampiran 7

Tabel 4.7
Shift-Share Dinamis 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010

LAPANGAN USAHA		Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		-3.322.559	0,0538
1	Pertanian. Peternakan. Perburuan dan Jasa Pertanian	-2,971,295	0,0544
	a. Tanaman Pangan	-1,341,867	-0,3007
	b. Tanaman Hortikultura	-501,590	-0,1972
	c. Tanaman Perkebunan	-95,598	-0,6622
	d. Peternakan	-446,950	-0,1044
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-56,840	0,0130
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	-137,391	0,0188
3	Perikanan	-213,873	-0,2584
Pertambangan dan Penggalian		-459.173	-0,5375
1	Pertambangan Minyak. Gas dan Panas Bumi	-	-
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-
3	Pertambangan Bijih Logam	-	-
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-387,149	-0,4325
Industri Pengolahan		-5.775.907	0,0583
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	-1,643,718	0,0350
3	Industri Pengolahan Tembakau	-1,358,400	0,0168
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	-156,417	0,0168
5	Industri Kulit. Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-24,667	0,0431
6	Industri Kayu. Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu. Rotan dan Sejenisnya	-345,548	-0,0233
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	54,177	-0,0145
8	Industri Kimia. Farmasi dan Obat Tradisional	-329,120	0,2775
9	Industri Karet. Barang dari Karet dan Plastik	-20,709	0,0888
10	Industri Barang Galian bukan Logam	-138,455	-0,0692
11	Industri Logam Dasar	-67,661	-0,1258
12	Industri Barang Logam; Komputer. Barang Elektronik. Optik; dan Peralatan Listrik	-71,195	0,2150
13	Industri Mesin dan Perlengkapan	-9,574	0,1248
14	Industri Alat Angkutan	-48,495	-0,0654
15	Industri Furnitur	-66,776	0,0341
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	16,922	0,0240
Pengadaan Listrik dan Gas		25.139	-0,0309

LAPANGAN USAHA		Efek Spesialisasi	Efek Kompetitif
1	Ketenagalistrikan	25,131	-0,0339
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	8	0,0630
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		29.589	-0,0373
Konstruksi		3.840.867	-0,0506
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		1.955.105	0,0529
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	33,622	0,0064
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,921,484	0,0599
Transportasi dan Pergudangan		-76.098	-0,0149
1	Angkutan Rel	4,952	0,0315
2	Angkutan Darat	-4,482	-0,0116
3	Angkutan Laut	-	-
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-
5	Angkutan Udara	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	-2,744	-0,0290
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		398.233	0,0508
1	Penyediaan Akomodasi	354,462	-0,0254
2	Penyediaan Makan Minum	43,770	-0,0064
Informasi dan Komunikasi		1.721.869	-0,0972
Jasa Keuangan dan Asuransi		189.335	-0,0458
1	Jasa Perantara Keuangan	90.860	-0,1186
2	Asuransi dan Dana Pensiun	28,372	0,0946
3	Jasa Keuangan Lainnya	70,035	-0,0798
4	Jasa Penunjang Keuangan	67	0,0273
Real Estate		539.920	-0,0191
Jasa Perusahaan		74.957	-0,0522
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		706.661	0,0479
Jasa Pendidikan		222.453	-0,3148
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		42.121	-0,0237
Jasa lainnya		-112.513	-0,0769
PDRB		-0,0097	-1,0372

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.

Lampiran 8

Tabel 4.8
Elastisitas dan Korelasi Komponen PDRB 2010-2016

Uraian	Elastisitas	Korelasi	Tren 2010-2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,6578	0,9605	Naik
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1,6519	0,9605	Naik
a. Tanaman Pangan	-1,0909	-0,7713	Turun
b. Tanaman Hortikultura	7,6665	-0,2537	Naik
c. Perkebunan	2,6834	0,9896	Naik
f. Peternakan	1,4045	0,9748	Naik
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,9335	0,9192	Naik
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	-14,5466	-0,6427	Turun
3. Perikanan	8,8938	0,6959	Naik
Pertambangan dan Penggalian	-2,8235	-0,9472	Turun
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	-	-	-
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-2,8235	-0,9472	Turun
Industri Pengolahan	0,9245	0,9926	Naik
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	0,6584	0,9988	Naik
3. Pengolahan Tembakau	1,6885	0,8925	Naik
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,8473	0,9349	Naik
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,6816	0,9944	Naik
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Bar	1,3488	0,9525	Naik
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	3,6428	0,4323	Naik
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,4984	0,9404	Naik
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,0841	0,9348	Naik
10. Industri Barang Galian bukan Logam	1,1793	0,8698	Naik
11. Industri Logam Dasar	1,1444	0,9363	Naik
12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,8467	0,8857	Naik
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,9495	0,9626	Naik
14. Industri Alat Angkutan	0,8977	0,9848	Naik
15. Industri Furnitur	0,9470	0,8176	Naik
16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi	1,5579	0,8848	Naik

Uraian	Elastisitas	Korelasi	Tren 2010-2016
dan pem			
Pengadaan Listrik dan Gas	0,8689	0,9760	Naik
1. Ketenagalistrikan	0,8683	0,9758	Naik
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,9233	0,9565	Naik
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	6,9939	0,5482	Naik
Konstruksi	1,2742	0,9909	Naik
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1,0470	0,9931	Naik
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	1,1780	0,9928	Naik
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1,0297	0,9899	Naik
Transportasi dan Pergudangan	0,8021	0,9948	Naik
1. Angkutan Rel	0,6428	0,9087	Naik
2. Angkutan Darat	0,8097	0,9955	Naik
3. Angkutan Laut	-	-	-
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan	0,7439	0,9957	Naik
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,8660	0,9991	Naik
1. Penyediaan Akomodasi	0,7243	0,9870	Naik
2. Penyediaan Makan Minum	1,0230	0,9910	Naik
Informasi dan Komunikasi	0,6989	0,9981	Naik
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,1475	0,9792	Naik
1. Jasa Perantara Keuangan	2,3574	0,8947	Naik
2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,4775	0,9940	Naik
3. Jasa Keuangan Lainnya	0,5708	0,9936	Naik
4. Jasa Penunjang Keuangan	0,6334	0,9961	Naik
Real Estate	0,8766	0,9985	Naik
Jasa Perusahaan	0,6745	0,9989	Naik
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,8387	0,9856	Naik
Jasa Pendidikan	0,7020	0,9936	Naik
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,6597	0,9974	Naik
Jasa lainnya	1,2772	0,9974	Naik

Sumber: PDRB Kota Surakarta, BPS, diolah.